

---

# **GENDER DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

---



---

# **GENDER DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

---

Penulis:

**Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.**



# **GENDER DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Penulis

**Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.**

Editor:

**Hamdan**

Desain Cover & Penata Isi

Tim Penerbit: Penerbit CV. Alliv Renteng Mandiri

Cetakan Pertama: September 2021



Diterbitkan Oleh:

CV. Alliv Renteng Mandiri

Lombok Nusa Tenggara Barat

WhatsApp. 0816253704

**ISBN: 978-623-97998-7-8**

Hak Cipta di lindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6).

## KATA PENGANTAR

Konsep relasi gender, yang mengandung unsur kekuasaan dan simbolisasi, pada akhirnya mempengaruhi kompleksitas isu gender dalam studi dan praktik hubungan internasional. Manifestasi kedua unsur tersebut dalam hubungan internasional tidak hanya berupa material, tapi juga non material sehingga meningkatkan signifikansi perspektif gender dalam memahami politik internasional. Unsur kekuasaan dan simbolisasi dalam relasi gender yang bersifat non material dapat berupa diskursus teori dan paradigma dalam bahasa tertulis atau tidak tertulis. Dalam konteks ini, melihat isu relasi gender dalam hubungan internasional menjadi penting karena hubungan internasional sebagai suatu studi bertanggung jawab dalam menganalisa dan mengkaji.

Studi hubungan internasional dikritik sebagai bias gender karena menghasilkan diskursus yang lebih mencerminkan dan mendorong pandangan dunia yang maskulin. Kritikan tersebut tercermin dalam berbagai studi yang dilakukan oleh generasi pertama feminis hubungan internasional yang dikenal sebagai feminis analitis dan feminis normatif ini terlibat dalam debat ketiga (*third debates*) dalam hubungan internasional yang mengkritisi sisi ontologis dan epistemologis dari pendekatan positivitis.

Memasukkan gender sangat penting untuk melihat praktik-praktik dalam hubungan internasional karena dapat membantu memahami persoalan global kontemporer yang nyata (material) di banyak negara, misalnya isu pembangunan. Hal ini menjadi fokus perhatian feminis generasi kedua yang mengembangkan feminisme empiris. Mereka mengkritisi aktivitas hubungan internasional yang mengeneralisasi dan tidak membedakan

implikasi pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. Misalnya, sistem dan kebijakan ekonomi politik internasional yang berlaku di banyak negara ternyata telah menyebabkan terciptanya posisi subordinat pada perempuan. Karena isu gender bukan hanya terkait dengan ketidakadilan terhadap perempuan tapi juga laki-laki, maka perspektif gender penting dalam membantu untuk merumuskan kebijakan yang tepat bagi masing-masing kelompok laki-laki dan perempuan sebagai respons atas berbagai persoalan global. Ketidakadilan gender dalam aktivitas hubungan internasional memiliki implikasi yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan.

Dengan mengacu kepada pentingnya gender dan hubungan internasional ini, oleh karenanya buku ini disusun dan hadir sebagai bacaan dan pelengkap buku-buku yang berkaitan dengan gender. Harapan terbesar penulis, agar buku ini bisa menjadi alternatif referensi khususnya bagi mahasiswa dan bacaan renyah bagi semua pihak.

Yogyakarta, 30 September 2021

**Penulis**

## **DAFTAR ISI**

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>

### **BAB 1**

#### **GENDER DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

A. Gender, Feminism, dan Kajian Hubungan Internasional .....	1
B. Gender, Feminism, dan Kajian Keamanan Internasional.....	8

### **BAB 2**

#### **FEMINIS DAN GENDERIS**

A. Feminisme Liberal .....	13
B. Feminisme Radikal.....	19
C. Feminisme Radikal Libertarian dan Kultural .....	24
D. Feminisme Marxis dan Sosialis .....	26

### **BAB 3**

#### **FEMINIS DAN GENDERIS 2**

A. Feminisme Psikoanalisis dan Gender.....	33
B. Feminisme Eksistensialis.....	38
C. Feminisme Postmodern .....	42
D. Black Feminism .....	45
E. Feminisme Islam .....	45

### **BAB 4**

#### **GENDER DAN PEMBANGUNAN**

A. Makna Pembangunan .....	49
B. Kegagalan Pembangunan Ortodoks .....	57

**BAB 5**  
**KESADARAN BARU DI KALANGAN PEREMPUAN**  
**PERIODE 1970-AN**

A. Di Negara Amerika Serikat, dan Aktivisme hingga Teori	65
B. Di Negara Inggris: Teori dan Aktivisme .....	72
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>75</b>
<b>Biodata Penulis .....</b>	<b>79</b>



## **BAB 1**

### **GENDER DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

#### **A. Gender, Feminisme, dan Kajian Hubungan Internasional**

Pada periode awal kehadiran feminisme, perempuan dianggap tidak rasional yang selalu menggunakan perasaan sebagai tolak ukur, dan laki-laki hanya untuk melindungi saja, tidak harus bekerja mencari nafkah. Sedangkan yang harus mencari nafkah hanya perempuan saja. Keadaan ini membuat beberapa filsuf Eropa memulai mengkritik terhadap kebijakan-kebijakan gereja yang diskriminatif. Isu-isu kesetaraanpun mulai merebak dan menjadi perdebatan di Eropa (Siti Muslikhati, 2004).

Pada saat itu perempuan juga secara diam-diam memulai dengan melakukan gerakan-gerakan kecil untuk menentang dominasi laki-laki. Namun tuntutan atau kesetaraan derajat antara perempuan dan laki-laki bisa mereka wujudkan pada awal abad ke 17 di Inggris. Tokoh-tokoh seperti Susan B. Anthony dan Elisabeth Cady Staton mempelopori gerakan-gerakan kebangkitan dari kalangan perempuan melalui surat kabar *The Revolution* (Anshori dan Kosasih, 1997).

Menurut Ratna (2012) feminisme adalah gerakan kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Feminis menolak anggapan bahwa perempuan merupakan konstruksi negatif, perempuan sebagai makhluk takluk, perempuan yang terjerat

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

dalam dikotomi sentral marginal, superior, inferior. Feminis menentang pandangan yang sudah diterima umum tentang dunia dan bagaimana pandangan-pandangan tersebut dikonstruksikan. Feminis menekankan bahwa pemahaman aspek-aspek sosial dan biologi harus dikembangkan dan disebarluaskan terutama oleh laki-laki. Feminisme adalah sebuah kepercayaan bahwa perempuan semata-mata karena mereka adalah perempuan diperlakukan tidak adil dalam masyarakat yang dibentuk untuk memprioritaskan cara pandang laki-laki serta kepentingannya (Gamble, 2010).

Ratna (2012) menjelaskan, feminis mencoba memberikan jalan tengah, untuk menemukan keseimbangan agar kedua pihak (laki-laki dan perempuan) memperoleh makna yang sesuai dengan kondisinya dalam masyarakat. Karena pada dasarnya tujuan feminis adalah keseimbangan dan interelasi gender. Dalam mencapai kesetaraan seksual atau keadilan gender, maka masyarakat harus memberikan perempuan hak politik dan kesempatan, serta pendidikan yang sama dinikmati oleh laki-laki. Melalui hak dan kesempatan yang sama itulah perempuan dapat mengoptimalkan potensinya untuk dapat setara dengan laki-laki.

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

Secara umum, perkembangan feminisme di dunia terdiri dari tiga gelombang. Feminisme gelombang pertama dimulai pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dengan tema identitas pembeda antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan ketidaksetaraan yang harus dilawan. Feminisme gelombang kedua tidak memiliki isu yang terlalu jauh dari feminisme gelombang pertama, yaitu memperjuangkan hak asasi perempuan. Namun pada feminisme gelombang kedua yang dimulai sejak 1960 hingga 1970 ini, feminisme sudah terbagi

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

menjadi tiga arah, yaitu Liberal, Marxis, dan Radikal. Feminisme Liberal fokus menghilangkan batasan antara laki-laki dan perempuan dalam hak-haknya, sementara itu Feminisme Marxis membela perempuan pekerja kelas bawah yang tidak digaji secara sepadan, sedangkan Feminisme Radikal justru ingin menghapus adanya perbedaan standar, nilai, asumsi, dan identitas antara laki-laki maupun perempuan (Valentina Schiavo, 2016).

Kemudian feminisme gelombang ketiga hadir untuk mengkritik feminisme gelombang kedua yang terlalu fokus membela hak kaum perempuan Barat, kelas menengah, dan heteroseksual. Feminisme gelombang ketiga berpendapat bahwa perempuan itu berbeda satu dengan yang lainnya berdasarkan etnis, kelas, ras, kewarganegaraan, dan seksualitas. Untuk itu, hak kaum perempuan yang dibela mestilah mewakili hak kaum perempuan di belahan dunia lainnya.

Dalam perspektif feminis, spesifikasi peran manusia laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dipandang timpang tidak egaliter. Artinya konstruksi sosial selama ini dianggap sangat berpihak kepada lelaki dan pada saat yang sama sangat menyudutkan kaum hawa menurut kaum feminis, hegemoni laki-laki atas perempuan ini memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, dan sebagainya serta tersosialisasikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi (Sri Suhandjati, 2002).

Najmah dan Khatimah Sai'dah (2003) menjelaskan feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

tersebut secara leksikal. Feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki.

Perempuan menjadi semua hal yang bukan laki-laki, dimana laki-laki dianggap kuat, perempuan lemah, laki-laki dianggap rasional dan perempuan emosional, laki-laki dianggap aktif, perempuan pasif, dan sebagainya. Dengan dasar pemikiran ini perempuan tidak mendapat kesempatan yang sama untuk masuk dalam dunia yang menjadi perhatian publik maupun dunia yang mencerminkan budaya. Singkatnya, feminisme mencoba mengubah situasi ini.

Bagi feminisme, gender hadir di seluruh aspek kehidupan manusia. Bagaimana seorang individu mengidentifikasi dirinya, bagaimana perilakunya di depan publik, hingga posisi sosialnya ditentukan dari konsepsi gender yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, menurut feminisme realitas sosial harus dipandang melalui kacamata gender.

Istilah gender merujuk pada perbedaan karakter perempuan dan laki-laki berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan peranannya dalam masyarakat. Istilah seks merujuk pada perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki secara biologis terutama yang terkait dengan prokreasi dan reproduksi. Ciri biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan.

Perbedaan gender yang juga disebut sebagai perbedaan jenis kelamin secara sosial budaya terkait erat dengan perbedaan secara seksual, karena dia merupakan produk dari pemaknaan masyarakat pada sosial budaya tertentu tentang sifat, status,

Posisi, dan peran laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri biologisnya (Manshour Fakih, 1996).

Hal itu berarti gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentuk sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain: kalau perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sifat-sifat itu dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Ketidakadilan gender ini biasanya bermula dari kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam akses pendidikan dan sumber ekonomi. Hal ini karena adanya stereotype bahwa perempuan lemah, dan hanya bisa menerima. Karena adanya mitos bahwa sperma sebagai sumber kehidupan dan perempuan hanya mampu menerima saja (Zaitun Subhan, 1999).

Pentingnya mengkonseptualisasikan gender ke dalam teori feminis postmodern sedemikian rupa sehingga gender tidak menjadi apapun selain menjadi korban eksklusifitas lain dari kebenaran universal serupa dengan pentingnya untuk

menetapkan arti dari posisi internasional dalam kajian hubungan internasional (Burchill, 2013).

Tidak hanya itu, isu feminisme dan gender kian melonjak ketika dikaitkan dengan hubungan internasional. Sejak tahun 1990, teori-teori tentang feminis dan hubungan internasional sudah mulai tumbuh dan berkembang (Jacqui True, 2001). Teori ini mencoba untuk melawan dominasi dari kaum pria yang dianggap berlebih. Bersama dengan teori kritis postmodernisme, konstruktivisme dan green politics feminisme mencoba untuk bersaing dengan teori-teori mainstream seperti realis dan liberalis. Seperti halnya teori-teori kontemporer lain, feminisme membahas hubungan internasional lebih jauh dari fokus tunggal pada hubungan antar Negara menuju analisis komprehensif aktor transnasional dan struktur dan transformasinya dalam politik global.

Sebagaimana dikatakan Wardhani (2015) bahwa perspektif feminisme ini pada dasarnya muncul sebagai sebuah pergerakan emansipasi yang menuntut adanya kesetaraan dan kebebasan yang telah dianggap tidak adil bagi kaum feminis. Dalam hal ini yang menjadi perhatian utama yakni kesetaraan gender yang ada dalam tatanan dunia internasional. Perspektif feminis ini pada dasarnya berusaha untuk mengenalkan gender sebagai suatu variabel yang relevan dalam memahami konteks kekuasaan global dan hubungan internasional. Perspektif feminis pada dasarnya memiliki agenda yang paling utama yakni menuntut adanya kesetaraan hak, peran dan pendapat wanita yang seharusnya turut diperhitungkan dalam tatanan internasional maupun studi hubungan internasional.

Hubungan feminisme dengan ranah hubungan internasional kian memuncak ketika feminisme hadir dengan berbagai pendekatan yang dimilikinya. Pendekatan yang pertama yakni liberal feminisme yang merupakan suatu pandangan yang mempercayai tentang adanya peranan oleh perempuan pada dunia politik dan pendekatan ini pada dasarnya bersifat mempertanyakan kembali mengapa wanita memiliki batasan-batasan di dunia. Teori Liberal Feminisme ini membahas tentang keinginan perempuan dan laki-laki harus disama ratakan dalam mencari keuntungan dalam bidang politik dan lain sebagainya.

Pendekatan yang kedua yakni Marxis Feminisme yang merupakan pendekatan yang lebih mengarah kepada pembahasan sistem capital internasional. Pendekatan yang kedua ini lebih memandang pada penindasan yang diberikan pada perempuan adalah merupakan hasil dari kapitalisme. Marxis Feminisme ini juga memandang kapitalisme dan patriarki sebagai struktur yang harus dibendung jika para perempuan menginginkan suatu persamaan derajat. Pendekatan yang ketiga yakni Post-Modernis Feminisme, yang merupakan pendekatan yang lebih berfokus kepada jenis kelamin. Post-Modernis Feminisme ini beranggapan bahwa perempuan seharusnya berada pada posisi yang sebaliknya jika ditinjau dari keadaan sekarang. Pendekatan yang ketiga ini menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki dapat disatukan dalam dunia politik untuk membangun dunia politik bersama-sama dan saling berdampingan.

Dan yang keempat yakni Standpoint Feminisme, pendekatan yang terakhir ini lebih pada dasarnya hanya berfokus kepada kritik yang dilakukan oleh Ann Ticker, yang melakukan koreksi terhadap dominasi yang dilakukan oleh kaum



laki-laki terhadap ilmu pengetahuan yang ada didunia, sehingga muncul anggapan bahwa ilmu pengetahuan yang ada sekarang hanya dipandang dan berdasar dari sudut pandang laki-laki saja. Ticker beranggapan bahwa dengan melakukan kritik ini akan membuat penjelasan ulang mengenai six objective principle yang ada pada politik internasional yang telah dikembangkan oleh Hans Morgenthau yang berdasar kepada pandangan perempuan terhadap dunia. Dari teori-teori yang telah dikembangkan oleh para pakar diatas dapat dilihat bahwa gender mengacu pada perilaku dan ekspektasi yang secara sosial dipelajari yang memisahkan antara maskulinitas dan empat feminitas (Peterson dan Runyan, 1999).

## **B. Gender, Feminism, dan Kajian Keamanan Internasional**

Isu gender dan feminisme tidak hanya berkutat pada hubungannya dengan internasional semata tanpa keterlibatan penuh yang diagendakan dan upaya agar gender dan feminisme menjadi bagian integral dalam isu-isu internasional, termasuk dalam hal ini tentang politik keamanan internasional. Sumbangan feminisme dalam HI, salah satunya dapat dilacak melalui gagasan-gagasan Tickner (1992). Dalam kajian Hubungan Internasional, peta keamanan internasional yang awalnya didominasi oleh realisme (sayap tradisional) mengalami pergeseran seiring munculnya kelompok-kelompok analisis kritis. Kelompok ini berkembang pasca perang dingin dengan menggugat pandangan tradisional yang terlalu negara-sentris dalam mengkaji keamanan internasional. Menurut kelompok ini, pandangan tradisional kurang menggali aspek individu sebagai kategori analisis serta hal-hal yang terkait erat dengannya ekonomi, lingkungan, pembangunan, dan gender.

Disitulah posisi Tickner, menggugat Realisme yang menjadi mainstream (sekaligus malestream) di era perang dingin.

Tickner memulai kritiknya dengan analisa genderisasi dalam politik internasional yang dicirikan dengan watak *manliness*—ketangguhan, keperkasaan, kemandirian, kekuasaan yang membentuk maskulinitas hegemonik. Dalam hal itu, marginalisasi perempuan melalui stereotip gender yang begitu kentara dan terasa telah menyebabkan politik internasional menjadi domain laki-laki. Dalam studi keamanan, hal ini membuat terbentuknya konsep keamanan nasional yang bias gender. Untuk itu, gender sebagai kategori analisis perlu dihadirkan untuk melihat politik internasional yang lebih “objektif”, sebagai pelengkap teori-teori kritis yang belum menyertakan analisis gender secara mendalam.

Kritik feminisme oleh Tickner terhadap Realisme dalam kajian keamanan kemudian menyorot pada konsepsi yang menjadi benteng pembelaan diri Realis sebagai ilmu yang objektif, yaitu pada konsep individu-nasional–internasional. Pertama, Tickner memandang konsep *Political Man* dalam gagasan Morgenthau yang diklaim sebagai konstruksi human nature konsep yang juga diperkuat oleh gagasan Machiavelli, mengenai *citizen-warrior* dan *first class citizen*. Menurut Tickner, konsep tersebut merupakan abstraksi dari laki-laki dalam kekuasaan publik, dimana *struggle of power* menjadi prinsip utama. Keamanan nasional dalam pengertiannya menjadi sarat kelaki-lakian dan glorifikasi atas perang disematkan semata-mata untuk menunjukkan eksistensi *Political Man*.

Kedua, gagasan realisme juga mewujudkan negara yang maskulin. Dalam konteks internasional politik—seturut ide realisme—negara menampakkan diri sebagai sosok maskulin

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

yang berperang atas nama keamanan nasional untuk melindungi rakyatnya yang lemah, yakni perempuan dan anak-anak. Hal ini juga yang menyebabkan kebijakan militer negara menjadi prioritas, sementara dunia militer sendiri menjadi domain laki-laki. Dalam konsepsi negara maskulin ini, perempuan mengalami pendevaluasian nilai karena dianggap tidak berkapasitas dalam urusan yang penting, militer dan perang. Akhirnya, dalam sistem internasional yang anarkis atau *state of nature* (tidak adanya struktur hierarki dalam politik internasional), sejatinya yang perang adalah umat laki-laki melawan umat laki-laki. Dengan demikian sejarah internasional politik adalah sejarah absennya perempuan.

Tawaran Tickner untuk memperbaiki analisis kajian keamanan tersebut antara lain, pertama, mendefinisikan keamanan nasional secara spesifik dari sudut pandang pengalaman perempuan. Konsepsi domestik *vis a vis* internasional mesti diurai karena ia mengaburkan apa yang disebut keamanan dalam konteks domestik. Dengan demikian, akan ditemui bahwa keamanan adalah perihail bukan hanya absennya perang, melainkan absennya kekerasan, ketertindasan struktur, ekonomi dan budaya.

Kedua, tidak memandang keamanan nasional (yang dianggap sudah mencakup individu) hanya berada dalam lingkup internasional (perang negara antar negara). Ia ingin membawa konsep anarki juga bisa terjadi di wilayah domestik, seperti peminggiran perempuan melalui peran reproduksi. Maka, asumsi feminis dalam keamanan menganggap kekerasan baik di ranah internasional, nasional bahkan wilayah keluarga sebenarnya saling terkait.

Ketiga, mendefinisikan ulang *citizenship* dengan menghancurkan gagasan *citizen-warrior* yang melemahkan nilai femininitas. Mitos bahwa perempuan adalah pihak yang dilindungi dan laki-laki melindungi harus dihapus. Memasukkan perempuan dalam peran militer dapat mengubah konsepsi menjadi *citizen-defend* ketimbang *warrior-patriot*.

Keempat, perspektif feminisme dalam keamanan negara dan perilakunya harus bergeser dari ide-ide Morgenthau, Hobbes, Machiavelli. Misalnya, konsepsi otonomi negara harus diubah dengan prinsip interdependency dan konsep power dirubah menjadi kooperasi. Mengutip Hannah Arendt (dalam Tickner, 1992) feminis mendefinisikan *power* sebagai kemampuan manusia dalam bertindak yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki kepedulian serupa, bukan *power* sebagai kekuatan perang seperti yang diasumsikan realisme. Cara feminisme memandang keamanan ini akan melampaui parsialitas realisme dan ketidakanggupannya menjelaskan keamanan dalam konteks relasi individu dan negara.

Dalam berbagai kacamata, Tickner memiliki kemampuan merumuskan pemikiran feminisme dalam studi keamanan internasional. Tickner memasukkan feminis radikal yang ia coba aplikasikan sebagai gugatan terhadap realisme, memasukkan analisis Marxis dalam analisis keamanan ekonomi, serta mengaplikasikan ekofeminisme dalam analisis keamanan lingkungan (Tickner, 1992). Dengan demikian, Tickner membuat sketsa posisi kanonik mengenai keamanan dalam realisme, ekonomi politik internasional, dan studi lingkungan internasional yang menunjukkan pertentangannya terhadap universalisme keamanan Realis. Menurut Sylvester (2004) Tickner menganggap bahwa feminisme memberitahu kita

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

tentang bagaimana "perempuan dipengaruhi oleh politik global atau cara kerja ekonomi dunia" yang membuat kita mempertanyakan "hubungan gender hierarkis saling terkait dengan bentuk dominasi lainnya".

Berdasarkan geliatnya dalam memperjuang pendampingan feminisme dengan politik serta keamanan internasional, Tickner memiliki sumbangsihnya dalam menjelaskan keterkaitan keputusan politik nasional dan internasional serta level keamanan individu di tingkat lokal telah membuat kajian keamanan mau tidak mau tergidik pada ranah lokal (yang selama ini dianggap bukan ontologi HI). Lebih jauh dari itu, kontribusi feminisme dalam menginterpretasikan kembali kekuasaan membuktikan bahwa power bukan hanya apa yang dikeluarkan dari moncong senjata atau sebatas para petinggi dunia yang melakukan deklarasi. Lebih dari itu, pervasivitas kekuasaan yang erat kaitannya dengan kesenjangan gender dan hierarki antara laki-laki dan perempuan telah mendiskriminasi peran perempuan dari bidang politik dan sosioekonomi global (Enloe, 1977).

## **BAB 2**

### **FEMINIS DAN GENDERIS**

#### **A. Feminisme Liberal**

Pada umumnya, perbincangan mengenai feminisme merupakan perbincangan tentang bagaimana pola relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, serta bagaimana hak, status, dan kedudukan perempuan disektor domestik dan publik. Feminisme memiliki sifat keperempuanan dalam sejarah, gerakan feminisme itu lahir dari awal kebangkitan perempuan untuk menggeser status sebagai makhluk kedua setelah lelaki di dunia ini. Gerakan feminisme berkembang pada abad pertengahan Eropa, yaitu pada abad 16-19 M (Siti Muslikhati, 2004).

Feminisme liberal adalah aliran feminisme yang berkonsentrasi pada kesetaraan hak antara laki-laki dengan perempuan. Feminisme Liberal sangat mendukung hak-hak individu dalam memenuhi keinginan, kepentingan, dan cita-cita yang harus dilindungi oleh hukum (Jill Steans, 2006). Dalam literatur yang lain dijelaskan feminisme liberal merupakan salah satu jenis feminisme yang lahir akibat pemikiran politik. Humm (Kartika, 2014:2) menyatakan bahwa Feminisme Liberal adalah gerakan yang tercermin dalam setiap perjuangan yang dilakukan oleh perempuan untuk menuntut hak kebebasan mereka. Akibat perempuan sering mendapatkan diskriminasi, tidak hanya di rumah, dalam tempat kerja pun mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda.

Perempuan sering dijadikan objek dalam berbagai jenis kekerasan, dan fenomena tersebut kebanyakan luput dari jangkauan formal hukum atau politik internasional. Untuk itu, Feminisme Liberal berusaha untuk mencegah atau mengurangi kekerasan terhadap perempuan tersebut dengan cara memberikan porsi yang setara untuk perempuan agar dapat bergabung atau berintegrasi di dalam berbagai level pemerintahan tanpa mengubah proses sosialisasi antara perempuan dan laki-laki (Laura Sjoberg, ed. 2010).

Seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, ciri dari gerakan ini tidak mengusulkan perubahan struktur secara fundamental, melainkan memasukan wanita kedalam struktur yang ada berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki. Feminisme Liberal mengatakan bahwa subordinasi perempuan karena adanya setting budaya dan hukum yang membatasi akses dan aktualisasi perempuan di sektor publik, karena itu segala hukum dan budaya yang berasaskan patriarki harus diganti dengan yang berkesetaraan gender.

Feminisme liberal berarti bahwa akar penindasan perempuan terletak pada tidak adanya hak yang sama, untuk memajukan dirinya dan peluang pembudayaan yang sama. Perempuan mendapat diskriminasi hak, kesempatan, kebebasannya karena ia perempuan. Perempuan juga dapat bekerja dan menopang kehidupan ekonomi keluarga. Perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi mereka juga dapat berperan ganda.

Hal ini berakibat pada ketidak mampuan kaum perempuan untuk bersaing dengan laki-laki. Asumsi dasar mereka adalah bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

berakar pada rasionalitas. Oleh karenanya, dasar perjuangan mereka adalah bahwa menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu, termasuk perempuan, karena perempuan adalah makhluk yang juga rasional (Mansour Faqih, 1996).

Feminisme liberal berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Feminisme liberal lebih memfokuskan pada perubahan undang-undang yang dianggap dapat melestarikan sistem patriarki. Misalnya, kepala keluarga konvensional yang berlaku secara universal adalah suami sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarganya. Hal ini oleh feminisme liberal tidak sesuai dengan konsep kebebasan individu untuk mandiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Konsep kepala keluarga ini menurut mereka dapat membuat perempuan menjadi terus tergantung pada laki-laki.

Feminisme liberal lebih fokus kepada penanganan diskriminasi perempuan daripada menuntut agar terjadi revolusi sosial dan politik. Secara umum Feminisme Liberal beranggapan bahwa perempuan dan laki-laki berbeda secara biologis, namun setara dalam hak (Putnam Tong Rosemarie, 1989).

Dasar pemikiran inilah yang menyebabkan para feminis masih ingin menuntut agar semua pihak meluruskan pikiran bahwasanya meski terdapat perbedaan biologis antara lakilaki dan perempuan, hal tersebut tidak sepatutnya dijadikan justifikasi atas tindakan kekerasan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan (Christine Sylvester, 2002).



Tokoh aliran ini antara lain Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1876), Anglina Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906). Meskipun dikatakan feminisme liberal, kelompok ini tetap menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, aliran ini masih tetap memandang perlu adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis di dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Schwartzman (2006), feminisme Liberal dapat dipahami dari prinsip-prinsipnya yaitu:

1. *All persons have an essential interest in leading a life in accordance with their own conception of value* (Semua orang memiliki kepentingan yang mendasar dalam memimpin menjalani kehidupannya sesuai dengan konsep nilai mereka sendiri).
2. *All person have an interest in freedom and liberties needed to develop and revise their conception of the good* (Semua orang memiliki kepentingan dalam kebebasan dan kebebasan yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memperbaiki konsepsi mereka untuk kebaikan).
3. *Government must treat individuals with equal concern and respect* (Pemerintah harus memperlakukan tiap individu dengan kepedulian dan rasa hormat yang sama).

Dilihat dari prinsip-prinsip yang disampaikan di atas, kelompok ini termasuk paling moderat di antara kelompok feminis. Kelompok ini membenarkan perempuan bekerja bersama laki-laki. Mereka menghendaki agar perempuan

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

diintegrasikan secara total di dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang dominan. Kelompok ini beranggapan bahwa tidak mesti dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, tetapi cukup melibatkan perempuan di dalam berbagai peran. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang terhadap peran-peran tersebut.

Gerakan feminisme liberal memiliki beberapa indikator penting yang menjadi pedoman untuk mengetahui sejauh mana seseorang dikatakan memiliki pemikiran feminisme Liberal, indikator tersebut adalah, perempuan memiliki pilihan dan mampu berpikir secara individu, dan rasional. Seorang perempuan berhak tidak menikah, bekerja, dan merubah dirinya ke arah yang lebih baik jika itu adalah pilihan pribadinya dan perempuan tersebut merasa pilihan itu adalah yang terbaik untuknya. Feminisme Liberal juga merasa bahwa pekerjaan di sektor domestik adalah pilihan yang tidak baik karena tidak menguntungkan untuk perempuan, dan akar dari ketertindasan yang ada berasal dari diri perempuan itu sendiri.

Kaum feminis liberal juga mengajak para perempuan, baik perempuan yang telah menikah dan mempunyai anak maupun perempuan yang belum menikah atau telah bercerai untuk bekerja (Tong, 2009). Alasannya dijelaskan oleh Friedan (Tong, 2009) yaitu karena bagi perempuan-perempuan yang hidup sendiri tanpa adanya tunjangan dari pria disekitarnya, akan sulit memenuhi kebutuhan finansialnya.

Kaum feminis liberal menyatakan bahwa perempuan zaman sekarang merupakan perempuan yang “Superwomen”, mereka dapat melebihi kemampuan mereka sebagai seorang wanita dan mulai mendapat penyeteraan dengan kaum laki-laki. Ditegaskan oleh

Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.

Friedan dalam Tong (2009): *“Observing the ways in which some members of her daughter’s generation ran themselves ragged in the name of feminism trying to be full-time career women as well as full-time housewives and mothers Friedan concluded that 1980s “superwomen” were no less oppressed (albeit for different reasons) than their 1960s “stay-at-home” mothers had been”*.

“Mengamati cara beberapa anggota dari generasi putrinya yang berlari dengan membawa nama feminisme mencoba menjadi wanita karir yang bekerja penuh dan sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang mengurus secara penuh, Friedan menyimpulkan bahwa era 1980-an perempuan “Superwomen” pun tak kalah tertindas (walaupun dengan alasan yang berbeda) dengan perempuan di era 1960-an yang menjadi ibu rumah tangga yang diam di rumah.”

Meski memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemenuhan hak asasi perempuan, feminisme liberal mendapatkan beberapa kritik, diantaranya; pertama, feminisme liberal dianggap kurang mempedulikan realitas sosial ekonomi dan terjadinya pembagian kerja secara seksual. Kedua, feminisme liberal cenderung menekankan persamaan perempuan dan laki-laki (sameness), tanpa mempertimbangkan realitas kelas dan penindasan yang terjadi oleh ideologi patriarkhi yang berakibat pada penerimaan nilai-nilai laki-laki daripada menentangnya dengan menggunkan perspektif perempuan. Ketiga, para feminisme liberal terkesan eksklusif perempuan kulit putih, kelas menengah dan heteroseksual (Valentina dan Ellin Rozana, 2007).

## **B. Feminisme Radikal**

Feminis radikal lebih menekankan kebalikan dari feminis liberal, jika sebelumnya kaum feminis mengusulkan kesetaraan kaum hawa dengan kaum adam maka radikal tidak demikian, hal ini dapat dilihat dari usulan bahwasannya hak antara laki-laki dan hak perempuan harus dibedakan. Misalnya perempuan dan laki-laki mengkonseptualkan kekuasaan secara berbeda, bila laki-laki lebih pada mendominasi dan mengontrol orang lain maka perempuan lebih tertuju dalam berbagi dan merawat kekuasaannya.

Feminis ini menyatakan bahwasannya adanya keterasingan yang dialami kaum perempuan karena diciptakan oleh unsur politik maka transformasi personal lebih kepada aksi-aksi radikal. Feminisme radikal menolak solusi yang ditawarkan oleh feminisme liberal dan feminisme sosialis, dengan alasan bahwa kedua solusi tersebut memperjuangkan kesetaraan hak dan revolusi sosialis tidak akan mampu memusnahkan patriarki yang telah mengakar di masyarakat.

Aliran feminisme radikal terbentuk untuk menggali akar-akar permasalahan munculnya ketidakseimbangan power antara perempuan dan laki-laki. Pada dasarnya, aliran ini berpendapat bahwa pembenahan sistem ketidakadilan antara dua jenis kelamin tidak bisa dilakukan hanya dalam tataran struktural atau reformasi hukum sebagaimana yang diusung oleh feminisme liberal, tetapi harus dilakukan pada tataran kultural dan perempuanlah yang harus memulainya (Judith Lorber, 2001).

Bagi feminisme radikal, satu-satunya cara untuk memusnahkan patriarki (dan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan) adalah dengan menghapuskan gender itu sendiri.

Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.

Perkembangan teknologi reproduksi dipandang sebagai salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut.

Hal ini didasarkan bahwa untuk sekian lama dunia dan kehidupan lebih ditentukan oleh suara laki-laki. Ide, naluri, suara perempuan sama sekali tidak diperhitungkan baik dalam kancan politik, produksi ilmu pengetahuan, perputaran dunia industri, maupun seluk-beluk penelitian sehingga kehidupan perempuan selalu menjadi obyek yang ditentukan sepihak oleh kaum laki-laki. Perempuan selalu teralienasi bahkan untuk menentukan dan memberi arah bagi kehidupan mereka sendiri. Saatnya perempuan didengarkan. Mendengarkan suara perempuan harus murni berasal dari perempuan, tidak dicampuri oleh pandangan seksisme laki-laki.

Lebih jelas, Tong (2009) menjelaskan feminis aliran ini menyatakan, laki-laki yang terlalu mengontrol kehidupan perempuan merupakan bentuk penindasan yang paling dasar dalam penindasan umat manusia, yang dinyatakan melalui kalimat di bawah ini:

*“Empowered by the realization that women’s fates were profoundly linked, radical feminist proclaimed that “the personal is political” and that all women are “sisters” They insisted that men’s control of both women sexual and reproductive lives and women’s self identity, self respect, and self-esteem is the most fundamental of all the oppressions human beings visit on each other”.*

“Dikuasai oleh perwujudan kalau takdir perempuan memiliki hubungan yang sangat besar, feminis radikal menyatakan kalau “pribadi bersifat politik” dan semua perempuan adalah saudara. Mereka menegaskan kalau kontrol laki-laki terhadap seksual dan reproduksi perempuan beserta identitas perempuan, rasa hormat terhadap

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

diri sendiri dan rasa percaya diri merupakan hal yang paling dasar dari penindasan umat manusia”.

Berdasarkan periodisasi kelahiran, feminisme radikal masuk menjadi kelompok *second wave feminism* (feminisme gelombang kedua) yang kemunculanya ditandai dengan lahirnya karya monumental Simone de Beauvoir’s yang berjudul *The Second Sex* pada tahun 1949 di Perancis. Karya itulah yang memulai munculnya analisis yang membedakan konsep gender dan sex. Berdasarkan kategorisasi corak perjuangan, aliran ini termasuk dalam kelompok gender resistance feminism yaitu aliran feminis yang berjuang melawan penindasan dan eksploitasi perempuan pada kehidupan sosial yang bias gender, khususnya mengenai isu seksualitas, kekerasan, dan representasi kultural mengenai perempuan.

Tong (2009) menjelaskan bahwa alasan perempuan merupakan kaum tertindas dapat dilihat dari penjelasan: Pernyataan bahwa penindasan perempuan sebagai seorang perempuan lebih dasar dibandingkan dengan bentuk penindasan lain terhadap manusia sangat sulit untuk dibongkar. Berdasarkan Alison Jaggar dan Paula Rothenberg, hal ini dapat dilihat dari lima hal ini:

1. Dilihat dari sejarah, perempuan adalah kelompok pertama yang tertindas.
2. Penindasan perempuan adalah penindasan yang paling banyak tersebar luas, dan dapat dilihat secara nyata di setiap kelompok masyarakat yang kita tahu
3. Penindasan perempuan adalah bentuk penindasan yang paling sulit dibasmi dan tidak dapat dihilangkan dengan penggantian status sosial lainnya seperti penghapusan kelas masyarakat.

4. Penindasan perempuan menyebabkan penderitaan yang terburuk bagi korbannya, baik secara kualitas maupun jumlahnya, walaupun korban yang bertahan seringkali tidak dianggap dikarenakan penilaian berdasarkan jenis kelamin dari si penindas dan korban
5. Penindasan perempuan menyediakan contoh konseptual untuk mengerti penindasan dalam bentuk lainnya.

Judith Lorber (2001) mendiskripsikan beberapa sumber ketidakadilan gender menurut feminisme radikal adalah:

1. Sistem penindasan terhadap perempuan oleh kaum laki-laki (sistem patriarkhi) yang selalu mendiskriminasikan perempuan;
2. Kekerasan dan kontrol laki-laki terhadap perempuan;
3. Pengabsahan penindasan terhadap perempuan melalui hukum, agama, dan lembaga-lembaga sosial lainnya;
4. Objektifikasi tubuh perempuan melalui iklan-iklan, mass media, dan produksi-produksi industri lainnya;
5. Eksploitasi perempuan melalui pornografi dan prostitusi.

Atun Wardatun (2006) menilai bahwa menurut pandangan aliran ini, perempuan adalah korban dari budaya patriarkhi yang terjelma dalam berbagai bentuk. Budaya patriarkhi ini didukung oleh berbagai institusi, di mana agama adalah salah satunya. Oleh karenanya, aliran ini juga mengusung kepentingan perempuan lewat perang terhadap teks-teks agama yang mendiskreditkan perempuan. Satu yang perlu di catat, bahwa keinginan aliran ini untuk menciptakan dunia sendiri, dunia yang ditentukan oleh suara perempuan karena pesimisme aliran ini melihat begitu kuat-berakarnya budaya patriarkhi sepanjang perempuan dan laki-laki masih berada dalam satu “ruang”. Teori feminisme radikal, memiliki tujuan yang sama

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

dengan aliran feminisme lainnya. Namun mempunyai pandangan berbeda terhadap aspek biologis (nature) (Megawangi, 1999).

Feminis radikal lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggapnya sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki sehingga perempuan ditindas. Manifesto feminisme radikal dalam *Notes from the Second Sex* mengatakan bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga formalisasi untuk menindas perempuan, sehingga tugas utama para radikal feminis adalah untuk menolak institusi keluarga, baik pada teori maupun praktis. Feminisme radikal cenderung membenci laki-laki sebagai individu, dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan (Mansoor Faqih, 1996).

Gerakan feminis radikal merupakan gerakan perempuan yang berjuang didalam realitas seksual, dan kurang pada realitas-realitas yang lainnya. Menurut mereka, penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki, seperti hubungan seksual adalah bentuk dari penindasan terhadap kaum perempuan. Patriarkhi adalah dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem hirarkhi seksual, dimana laki-laki mempunyai kekuasaan superior dan privilege ekonomi (Ahmad Taufiq, 2009).

Gerakan feminis radikal terutama mempersoalkan bagaimana caranya menghancurkan patriarki sebagai sistem nilai yang melembaga di dalam masyarakat. Kelompok ekstrim dari gerakan ini menamakan diri sebagai feminis lesbian. Menurutny, inti dari politik kaum feminis lesbian adalah berusaha menunjukkan bahwa hubungan heteroseksual sebagai suatu lembaga dan ideologi merupakan benang utama dari



kekuatan laki-laki. Sepanjang perempuan meneruskan hubungannya dengan laki-laki, akan sulit bahkan tidak mungkin untuk berjuang melawan laki-laki. Jadi, perempuan harus berusaha memutus hubungan dengan laki-laki.

### **C. Feminisme Radikal Libertarian dan Kultural**

Teori-teori feminis, sebagai alat kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya erat berkaitan dengan konflik kelas dan ras, khususnya konflik gender. Feminis, khususnya masalah-masalah mengenai perempuan, pada umumnya dikaitkan dengan emansipasi, gerakan kaum perempuan untuk menuntut persamaan hak dengan kaum laki-laki, baik dalam bidang politik dan ekonomi, maupun gerakan sosial budaya pada umumnya. Selain itu persamaan hak yang diinginkan oleh kaum perempuan juga datang dari permasalahan tubuh perempuan yang selalu menjadi objek. Oleh karena itu, muncul beberapa aliran feminis diantaranya yaitu feminis radikal. Ada dua kubu yang terdapat dalam feminis radikal, yaitu feminis radikal kultural dan feminis radikal libertarian.

Feminisme radikal libertarian memberikan perhatian lebih pada konsep isu-isu feminin, pada hak-hak reproduksi dan peran seksual. Menurut kelompok ini, solusi atas masalah ini adalah dengan mengembangkan ide androgini, yaitu sebuah model yang mempromosikan pembentukan manusia seutuhnya dengan karakteristik maskulin feminin.

Pandangan feminis radikal-kultural di sampaikan Tong (1998) merendahkan nilai-nilai maskulin tradisional. Alih-alih keterbukaannya yang terlihat jelas terhadap androgini di dalam *Beyond God the Father*, konsep androgini Daly sebenarnya lebih mirip dengan konsep French. Ia menolak model androgini

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

“pluralis”, yang di dalam konsepnya memandang, bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai sifat-sifat yang berbeda, tetapi seharusnya setara dan saling melengkapi, dan juga model androgini “asimilasi”, yang memandang bahwa perempuan dan laki-laki harus menggabungkan baik sifat maskulin maupun feminine ke dalam diri mereka, untuk mencapai kemanusiaan yang penuh.

Lebih lanjut Tong (1998), mereka menyatakan kalau perempuan tidak memerlukan sifat maskulin atau pengaruh apapun. Perempuan hendaknya menjadi perempuan seutuhnya. Hal yang salah dalam sistem sosial saat ini adalah anggapan masyarakat terhadap sifat feminisme itu sendiri. Dalam bukunya, Tong (1998) mengutip pendapat Alison M. Jagger bahwa: “Wanita, kata mereka, seharusnya tidak mencoba untuk menjadi pria. Sebaliknya, mereka harus mencoba untuk menjadi lebih seperti wanita, menekankan nilai-nilai dan sifat-sifat yang secara budaya terkait dengan wanita (“saling ketergantungan, komunitas, relasi, berbagi, emosi, fisik, kepercayaan, tiadanya hirarki, kodrat, imanensi, proses, kegembiraan, perdamaian, dan kehidupan”) dan mengurangi penekanan nilai-nilai dan sifat-sifat yang secara budaya terkait dengan pria (“kebebasan, otonomi, kecerdasan, kehendak, kewaspadaan, hirarki, dominasi, kesopanan, keberadaan yang lebih penting, hasil, pertapaan, perang, dan kematian”).

Perempuan yang memiliki sifat androgini adalah perempuan yang memiliki karakter baik dari sifat-sifat maskulin dan feminim di dalam dirinya atau lebih ekstrimnya lagi, mempunyai campuran sifat maskulin dan feminim, baik atau buruk sesuai dengan apa yang mereka sukai. (Tong, 2009).

Feminis radikal kultural bersikeras pada proposisi yang menyatakan bahwa perempuan seharusnya tidak seperti laki-laki, dan tidak perlu bagi perempuan untuk berperilaku seperti laki-laki. Kaum feminis radikal kultural mencegah penerapan nilai-nilai maskulin yang secara kultural dikenakan pada pria, misalnya kebebasan, otonomi, intelektual, kehendak, kirarki, dominasi, budaya, transendensi, perang dan kematian.

Perbedaan antara feminisme radikal libertarian dengan feminisme radikal kultural mengungkapkan adanya perbedaan sudut pandang yang tajam antara keduanya mengenai reproduksi. Dimana pertentangannya memperdebatkan apakah reproduksi merupakan sumber “penindasan perempuan atau “kekuatan perempuan”. Meskipun demikian, terdapat satu hal yang mengikat ide radikal feminisme, yaitu pada pemahaman dasar bahwa sistem gender adalah basis dari penindasan perempuan. Feminis mengangkat isu-isu tentang seksisme, patriarkhi, hak-hak reproduksi, kekuatan hubungan laki-laki dan perempuan, dikotomi antara ranah privat dan ranah publik.

#### **D. Feminisme Marxis dan Sosialis**

Konsep dasar dari feminisme marxis dan sosialis didasarkan pada teori Marx, yang memandang bahwa manusia baru bermakna apabila mereka melakukan kegiatan berproduksi, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia lewat berproduksi menciptakan masyarakat yang kemudian menciptakan atau membentuk mereka. Dari sudut pandang teori ekonomi dipandang bahwa sistem kapitalisme hanya mendasarkan pertukaran hubungan dan pertukaran kekuasaan yang nantinya mengharapkan surplus value dari hubungan employer.

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

Sehingga manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih sebab mereka sebagai pekerja yang tertindas (Umar, 2001).

Feminisme marxis klasik sangat menyadari bahwa relasi gender merupakan produk kehidupan sosial dan menunjukkan adanya ketimpangan. Sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara-cara produksi yang tentunya menguntungkan laki-laki. Proses produksi mengalami perubahan ketika kapitalisme berkembang. Perubahan tersebut bergerak dari sifatnya yang subsisten kearah pertukaran. Sistem produksi seperti ini dikontrol laki-laki dan pada saat yang sama laki-laki juga mengontrol hak-hak sosial perempuan. Solusi terhadap ketimpangan gender adalah menghapus kapitalisme karena kapitalisme memarginalisasikan hak-hak perempuan terhadap hal milik dan juga hak waris.

Feminisme Marxis diposisikan “sebagai reaksi terhadap pemikiran feminisme liberal tentang bagaimana meningkatkan status dan peranan perempuan, feminisme Marxis berpendapat bahwa ketertinggalan yang dialami oleh perempuan bukan disebabkan oeh tindakan individu secara sengaja tetapi akibat dari struktur sosial, politik dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Menurut mereka, tidak mungkin perempuan dapat memperoleh kesempatan yang sama seperti laki-laki jika mereka masih tetap hidup dalam masyarakat yang berkelas” (Hidayati, 1995).

Aliran ini menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran dalam dua jenis kelamin itu sesungguhnya disebabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini menolak anggapan tradisional dan para teolog, bahwa status perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena faktor

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

biologis. Ketertinggalan yang dialami oleh perempuan bukan disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja tetapi akibat dari struktur sosial, politik dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Menurut mereka, tidak mungkin perempuan dapat memperoleh kesempatan yang sama seperti laki-laki jika mereka masih tetap hidup dalam masyarakat yang berkelas (Yunahar Ilyas, 1997).

Feminisme marxis yang berpandangan bahwa penindasan perempuan terjadi karena eksploitasi kelas dalam relasi produksi. Isu perempuan selalu diletakkan sebagai kritik terhadap kapitalisme. Dalam kapitalisme, penindasan perempuan diperlukan karena menguntungkan. Merumahkan perempuan misalnya akan sangat menguntungkan laki-laki karena mereka bisa bekerja lebih produktif. Dengan ini feminisme marxis beranggapan bahwa penyebab penindasan perempuan bersifat struktural, maka memutuskan hubungan dengan sistem kapitalisme adalah solusi untuk menghilangkan penindasan tersebut (Mansoer Faqih, 1996).

Menurut perspektif feminisme marxis, sebelum kapitalisme berkembang, keluarga adalah kesatuan produksi. Semua kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dilakukan oleh semua anggota keluarga termasuk perempuan. Tapi setelah berkembangnya kapitalisme industri, keluarga tidak lagi menjadi kesatuan produksi. Kegiatan produksi barang-barang kebutuhan manusia telah beralih dari rumah ke pabrik. Perempuan tidak lagi ikut dalam kegiatan produksi. Kemudian terjadi pembagian kerja secara seksual, dimana laki-laki bekerja di sektor publik yang bersifat produktif dan bernilai ekonomis, sedangkan perempuan bekerja di sektor domestik yang tidak produktif dan tidak bernilai ekonomis. Karena kepemilikan

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

materi menentukan nilai eksistensi seseorang maka akibatnya, perempuan yang berada dalam sektor domestik yang tidak produktif dinilai lebih rendah dibanding dengan laki-laki yang berada dalam sektor publik yang produktif.

Feminisme sosialis timbul sebagai kritik terhadap feminisme Marxian. Pada saat feminisme Marxian menganggap bahwa sistem patriarki muncul pada waktu masyarakat mencapai tahap perkembangan kapitalisme, feminisme sosialis berpendapat bahwa sistem patriarki tersebut sudah ada sebelum kapitalisme.

Feminisme sosialis mulai dikenal tahun 1970-an. Aliran ini memiliki ketegangan antara kebutuhan kesadaran feminis di satu pihak dan kebutuhan menjaga integritas materialisme marxisme di pihak lain, sehingga analisis patriarki perlu ditambahkan dalam analisis mode of production. Mereka mengkritik asumsi umum, hubungan antara partisipasi perempuan dalam ekonomi memang perlu, tapi tidak selalu akan menaikkan status perempuan. Rendahnya tingkat partisipasi berkorelasi dengan rendahnya status perempuan. Tetapi keterlibatan perempuan justru dianggap menjerumuskan perempuan, karena mereka akan dijadikan budak (Mansoor Fakih, 2001).

Dalam perkembangannya feminisme sosialis memiliki paham yang sama dengan feminisme liberal dimana mereka beranggapan bahwa patriarki merupakan sumber lain dari penindasan perempuan. Feminisme liberal dipengaruhi paham individualisme yang menekankan pentingnya kebebasan, khususnya kebebasan dalam memilih. Gerakan feminisme ini adalah agar perempuan mendapatkan kontrol, baik terhadap tubuh dirinya maupun dalam dunia sosialnya.

Aliran ini mulai berkembang di Jerman dan di Rusia dengan menampilkan beberapa tokohnya, seperti Clara zetkin (1857-1933) dan Rosa Luxemburg (1871-1919). Struktur ekonomi atau kelas di dalam masyarakat memberikan pengaruh efektif terhadap status perempuan, karena itu, untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan supaya seimbang dengan laki-laki, diperlukan peninjauan kembali stuktural secara mendasar, terutama dengan menghapuskan dikotomi pekerjaan sektor domestik dan sektor publik.

Feminisme sosialis melakukan sintesis antara metode historis materialis Karl Marx dan Friedrich Engels dengan gagasan personal is political dari kaum feminis radikal. Kedua tokoh ini melihat bahwa kaum perempuan kedudukannya identik dengan kaum proletar pada masyarakat kapitalis Barat. Mereka dalam teorinya mempermasalahkan konsep kepemilikan pribadi, dan menganalogikan perkawinan sebagai lembaga yang melegitimasi laki-laki memiliki istri secara pribadi. Gejala inilah yang dianggap kedua tokoh ini merupakan bentuk penindasan pada perempuan (Riant Nugroho, 2008).

Feminisme sosialis mencoba menggabungkan pandangan feminisme marxis, feminisme radikal, dan feminisme psikoanalisis. Bagi mereka, anggapan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, seperti yang dikatakan feminisme marxis, adalah tidak selalu tepat. Bagi mereka ideologi patriarki adalah terpisah dan berbeda dari model dan produksi ekonomi. Tidak jarang keterlibatan perempuan ini justru menjerumuskan mereka menjadi budak. Namun demikian, yang terjadi adalah keterjalinan antara patriarki dan kapitalisme. Kapitalisme menjalin kekuatan dengan patriarki untuk mendominasi buruh perempuan dan

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

seksualitas melalui penguatan dan pengembangan ideologi yang merasionalisasikan penindasan perempuan. Oleh karena itu mereka beranggapan bahwa kritik terhadap kapitalisme mesti disertai dengan kritik terhadap dominasi atas perempuan.



*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

## **BAB 3**

### **FEMINIS DAN GENDERIS 2**

#### **A. Feminisme Psikoanalisis dan Gender**

Feminisme psikoanalitik merupakan aliran yang melakukan interpretasi ulang terhadap konsep psikoanalisis Freud dari perspektif para feminis. Mereka menolak konsep “biological determinism” Freud yang selalu meletakkan posisi perempuan berada di bawah kontrol lelaki. Bagi Freud seks itu memang ada dua (laki-laki dan perempuan) akan tetapi esensinya cuma satu saja, yaitu laki-laki (Montrelay, 1993).

Feminisme psikoanalitis mendasarkan teorinya pada pemahaman bahwa alasan dasar bagi penindasan perempuan terletak pada kejiwaan perempuan. Phyllis Chesler dalam tulisannya yang berjudul *Women and Madness* (1972) menyatakan bahwa sakit kejiwaan perempuan kemungkinan adalah hasil dari pengkotak-kotakkan peran gender atau dampak dari masyarakat yang terkondisi berdasarkan jenis kelamin, maka sebagai konsekuensinya seorang perempuan akan dicap tidak waras apabila ia tidak berperilaku sesuai dengan label yang diberikan masyarakat kepadanya.

Feminisme psikoanalisis banyak diilhami dari pemikiran-pemikiran Freud tentang determinisme. Menurut Freud seperti dikutip Tong (2006), secara biologis laki-laki memiliki penis dan perempuan tidak memiliki penis. Pandangan ini menjadi dasar penindasan terhadap kaum perempuan.

Pemahaman Freud yang lain juga bahwa anak-anak mengalami tahapan psikoseksual yang sangat jelas. Tahapan yang dialami anak-anak tersebut antara lain; Pertama, tahap oral yaitu ketika bayi menemukan kenikmatan saat mengisap payudara ibunya dan jarinya. Kedua, tahap anal yakni ketika anak berusia dua sampai tiga tahun menyukai sensasi saat pengendalian pengeluaran kotorannya. Ketiga, tahap falik, yaitu ketika anak berusia tiga sampai empat tahun menemukan kenikmatan pada genitalnya. Keempat, tahap laten ketika anak berusia enam tahun sampai pubertas. Tahapan genital dimulai saat remaja dengan ditandai kebangkitan dorongan seksualnya. Jika normal, dorongan itu akan diarahkan menuju anggota jenis kelamin yang berbeda dan menjauh dari stimulasi otoerotis dan homoerotis (Tong, 2006).

Kondisi depresif yang diderita perempuan mengarahkan pada kekurangwarasan dan sakit jiwa ini kemudian dibakukan dalam bentuk depresi, upaya bunuh diri, neurotis kecemasan, paranoia, lesbianisme, dan sebagainya. Dalam situasi ketika perempuan berlawanan dengan standar yang berlaku, maka ia akan dilihat sebagai neurotis atau psikotis (Arivia, 2003). Misalnya, seorang perempuan akan dianggap aneh jika ia berperilaku kritis, tegas, dan vokal dalam suatu masyarakat yang menuntut seorang perempuan untuk patuh, pasrah, dan diam.

Lebih jauh Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun di atas tiga struktur, yaitu id, ego, dan superego. Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi ketiga struktur itu. Pertama, id, sebagai pembawaan sifat-sifat biologis seseorang sejak lahir, termasuk nafsu seksual dan insting yang cenderung selalu agresif. Id bagaikan sumber energi memberikan kekuatan terhadap kedua struktur

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

berikutnya. Id bekerja di luar sistem rasional dan senantiasa memberikan dorongan untuk mencari kesenangan dan kepuasan biologis. Kedua, ego, bekerja dalam lingkup nasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari id. Ego berusaha mengatur hubungan antara keinginan subjektif individual dan tuntutan objektif realitas sosial. Ego membantu seseorang keluar dari berbagai problem subyektif individual dan memelihara agar bertahan hidup dalam dunia realitas. Ketiga, superego, berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian, berupaya mewujudkan kesempurnaan hidup, lebih dari sekedar mencari kesenangan dan kepuasan. Superego juga selalu mengingatkan ego agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol id.

Individu yang normal, menurut Freud, ialah ketiga struktur tersebut bekerja secara proporsional. Kalau satu diantaranya lebih dominan maka pribadi yang bersangkutan akan mengalami masalah. Jika struktur id lebih menonjol maka diri yang bersangkutan akan mengalami masalah. Jika struktur id lebih menonjol maka yang bersangkutan cenderung hedonistis. Sebaliknya, jika superego lebih menonjol maka yang bersangkutan sulit mengalami perkembangan, karena selalu dibayangi rasa takut dan lebih banyak berhadapan dengan dirinya sendiri.

Tahapan seksualitas yang ditunjukkan Freud di atas, ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berakar dari rangkaian pengalaman seksualitas masa kanak-kanak hingga dewasa yang mengakibatkan perbedaan cara pandang, tidak hanya laki-laki memandang dirinya sebagai maskulin, dan perempuan memandang dirinya sebagai feminin,

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

tetapi juga cara masyarakat memandang bahwa maskulinitas lebih baik daripada femininitas.

Teori prikoanalisa Freud sudah banyak didramatisir oleh kalangan feminis. Freud sendiri sebenarnya sudah memperingatkan kalau pendapatnya itu masih tentative dan masih terbuka untuk dikritik. Ia sama sekali tidak bermaksud menyudutkan kaum perempuan. Sikap feminis yang akademisi seperti Nancy Chodorow dan Juliet Mitchell dapat dinilai bijaksana, karena tidak serta merta menolak teori Freud tetapi berupaya menyempurnakan metode analisa yang digunakan Freud di dalam menarik suatu kesimpulan (Lindsey, 1990).

Secara umum, feminisme psikoanalisis termasuk dalam gerakan sosial perempuan. Asumsi utama pemikiran feminisme psikoanalisis adalah, telah terjadi ketidakadilan dan relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Aktivis feminisme jenis ini kemudian menggunakan kerangka pikir teori psikoanalisis Freud guna mencari sumber masalah ketidakseimbangan ini dalam masyarakat dan budaya.

Nancy Chorodow dalam *The Reproduction of Mothering* (1978) mengungkapkan fakta bahwa kecenderungan dominasi laki-laki terhadap perempuan sesungguhnya berakar dari fase bayi. Baik anak perempuan maupun laki-laki mengidentifikasikan dirinya dengan ibu karena ikatan mental dan fisik dengan ibunya. Seiring pertumbuhannya, seorang perempuan kehilangan kedekatan dan ikatannya dengan ibu, dan menggantikannya dengan ayah, kemudian dengan lawan jenisnya.

Proses ini tidak membawa dampak yang sangat besar bagi perempuan, karena ia tetap memiliki feminitas ibunya dan juga hubungannya dengan ayahnya. Sebaliknya bagi laki-laki,

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

proses ini berdampak besar karena ia harus menekan pengidentifikasiannya dengan ibunya agar ia seperti ayahnya secara utuh. Hal ini berbeda dari perempuan yang relasinya dengan sang ayah merupakan relasi tambahan, sedangkan relasi laki-laki terhadap ayah adalah relasi pengganti. Dengan demikian, dalam hubungan sosialnya, seorang perempuan lebih suka berkelompok dan penuh kasih sayang daripada laki-laki karena kedekatannya dengan sang ibu terus berlangsung. Kebalikannya, seorang laki-laki cenderung merasa terpenjara dalam hubungannya dengan orang lain.

Teori Freud tersebut telah ditolak oleh para feminis, seperti Betty Fridan, Shulamit Firestone, dan Kate Millet. Mereka beragumen bahwa posisi serta ketidakberdayaan sosial perempuan terhadap laki-laki, kecil hubungannya dengan biologi perempuan, dan sangat berhubungan dengan konstruksi sosial atas feminitas (Tong, 2006). Dalam hal ini Freidan menyalahkan Freud karena telah mendorong perempuan untuk beranggapan bahwa ketidaknyamanan serta ketidakpuasan perempuan berasal dari ketidakadaan penis saja dan bukan karena satatus sosial ekonomi, serta budaya yang menguntungkan laki-laki. Dengan mengisyaratkan kepada perempuan bahwa mereka dapat mengganti penis dengan bayi, menurut Freidan, Freud telah merayu perempuan untuk masuk kedalam jebakan mistik feminine. Oleh karena itu, Freidan menyalahkan Freud yang telah menjadikan pengalaman seksual yang sangat spesifik (Vaginalisme) sebagai keseluruhan serta akhir dari eksistensi perempuan (Tong, 2006). Freidan juga mengutuk Freud, karena telah mendorong perempuan untuk menjadi reseptif, pasif, bergantung pada orang lain, dan selalu siap untuk mencapai tujuan akhir dari kehidupan seksual

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

mereka, yaitu hamil. Sementara itu, Millet menganggap pandangan Freud bahwa perempuan mengalami kecemburuan terhadap penis merupakan contoh transparan dari egoisme laki-laki.

Kekhasan feminisme psikoanalisis adalah pandangannya bahwa sistem patriarki adalah sebuah sistem dimana seluruh laki-laki dalam tindakan sehari-hari dengan penuh semangat terus menerus mencipta dan melestarikan sistem. Perempuan hanya kadang-kadang menentang. Namun jauh lebih sering menyetujui penindasan itu tanpa bantahan atau secara aktif berperan. Hal ini disebabkan oleh posisi subordinasi perempuan. Menurut teoritis feminisme psikoanalisis, ada dua kemungkinan penjelasan mengenai dominasi laki-laki atas perempuan. Yaitu, rasa takut pada kematian dan lingkungan sosioemosional tempat terbentuknya kepribadian anak muda (Ritzer dan Goodman, 2004).

## **B. Feminisme Eksistensialis**

Aliran feminisme eksistensialis ini memiliki dasar pemikiran “Ada” dari filsuf Jean Paul Sartre yakni *etre-en-soi* (ada-dalam-dirinya); *etre-pour-soi* (ada-bagi-dirinya) dan *etrepour-les-autres* (ada-untuk-orang-lain). Tokoh yang paling terkemuka pada aliran feminisme eksistensialis ini adalah Simone de Beauvoir. Isu atau tema yang aliran ini angkat dalam pemikiran feminisme eksistensialis adalah mengenai analisis ketertindasan perempuan karena dianggap sebagai “liyan” (*the other*) dalam cara beradanya di *etre-pour-les-autres*. Simone de Beauvoir dalam bukunya *The Second Sex* menggambarkan bagaimana kaum laki-laki telah memposisikan diri mereka sebagai “diri sendiri” (*the self*) dan kaum perempuan sebagai

Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.

“orang lain” (*the other*). Dikotomi ini tidak saja menyiratkan makna bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki melainkan juga bahwa perempuan lebih rendah (atau dalam istilah Simone de Beavoir disebut sebagai “kelamin kelas kedua”) daripada kaum laki-laki (Tong, 1998).

Karya Sartre banyak dipengaruhi oleh G. W. F. Hegel, Edmund Husserl, dan Martin Heidegger. Pemikiran Hegel mengenai psike sebagai jiwa yang teralienasi oleh diri (*selfalienated spirit*) paling banyak berpengaruh terhadap pemikiran Sartre. Hegel melihat kesadaran berada dalam sebuah arena yang terpisah. Di satu sisi kesadaran berada pada diri yang transenden (berada melampaui kesadaran dan kognisi) atau ego yang mengamati; dan di sisi lain terletak pada diri yang imanen (melekat di dalam diri) atau ego yang mengamati (Tong, 2006).

Pemikiran Hegel, kemudian dikembangkan Sartre melalui konsep “*being for itself*” (*pour-soi*) (ada untuk dirinya sendiri) dan “*being in itself*” (*en-soi*) (ada dalam dirinya sendiri). Konsep *being in it self* mengacu pada sesuatu yang konstan yaitu eksistensi material dimana manusia menghayatinya bersama-sama dengan binatang, tumbuhan, dan mineral. Sedangkan *being for itself* mengacu pada sesuatu yang bergerak, yaitu eksistensi kesadaran dimana manusia menghayatinya hanya dengan manusia lain. Sartre juga menambahkan satu konsep yaitu “*being for others*” (*mit-sein*) (ada untuk yang lain) yaitu sebuah kebersamaan dengan sesuatu. *Being for others* merupakan konflik yang terjadi secara terus menerus, karena setiap *for itself* berusaha untuk membebaskan *beingnya* dengan cara langsung untuk membuat sebuah objek di luar diri yang lain (Tong, 2006).



Tong (1998) menjelaskan bahwa Simone de Beauvoir menyebut kaum lelaki sebagai *self* dan kaum perempuan sebagai *other*. Jika *other* merupakan ancaman bagi *self*, maka perempuan merupakan ancaman bagi laki-laki. Jika laki-laki menginginkan bebas dari ancaman itu, ia harus menundukkan atau mengontrol perempuan. Maka terciptalah mitos bahwa perempuan tidak rasional, kompleks, tidak dimengerti, tetapi pada saat yang sama lelaki mencari perempuan yang ideal untuk menjadikan dirinya lengkap dan sempurna.

Dalam mengkaji tentang *other* ini, Simone De Beauvoir menggunakan tiga perspektif untuk mengkategorikan perempuan sebagai *other*, yaitu dari perspektif biologis, psikoanalisis, dan materialisme sejarah. Dari sudut pandang biologis, ia melihat dari proses pembuahan sel telur kaum perempuan oleh sperma kaum pria. Sedangkan dari perspektif psikoanalisa, ia melihat dari perjuangan kaum perempuan terhadap kecenderungan kejantannya dan keperempuannya. Sementara dari perspektif Marxisme, menurut de Beauvoir, kaum perempuan ditindas karena bentuk-bentuk kehidupan yang harus mereka lakukan di masyarakat kelas, dimana massa dari kaum laki-laki dan perempuan telah ditindas oleh sekelompok kecil kelas berkuasa. Bagi kaum Marxis, kondisi material kehidupan pada akhirnya merupakan fakta-fakta fundamental dari sejarah manusia (Tong, Sunarto, 2000).

Berdasarkan hal itu, pembebasan bagi feminisme eksistensialis adalah penghapusan keinginan untuk menjadi subjek. Jika tidak ada *self*, tidak ada keinginan untuk mengontrol atau menguasai atau mengobjektivikasi *other*. Dari sisi perempuan, kebebasan perempuan adalah ketika perempuan mencapai transendensi dalam arti berdiri sejajar dengan laki-laki. Menurut Beauvoir, transendensi dicapai dengan bekerja,

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*  
menjadi intelektual,

berusaha menciptakan transformasi sosialis di dalam masyarakat, dan menolak untuk menginternalisasikan status other-nya (Poerwandari dan Hidayat, 2000).

Menurut Simone de Beauvoir, relasi antara kaum laki-laki dan perempuan itu tidak akan secara otomatis berubah, bahkan walau sudah terjadi perubahan sistem dalam masyarakat dari kapitalis ke sosialis. Kaum perempuan akan tetap jadi other, baik dalam masyarakat kapitalis maupun sosialis.

Arivia (2003) menyatakan bahwa dalam feminisme eksistensialisme penindasan perempuan diawali dengan beban reproduksi yang harus ditanggung oleh tubuh perempuan. Dimana terdapat berbagai perbedaan antara perempuan dan laki-laki, sehingga perempuan dituntut untuk menjadi dirinya sendiri dan kemudian menjadi “yang lain” karena ia adalah makhluk yang seharusnya di bawah perlindungan laki-laki, bagian dari laki-laki karena diciptakan dari laki-laki. Dengan demikian, perempuan didefinisikan dari sudut pandang laki-laki, sehingga laki-laki adalah subjek dan perempuan adalah objeknya atau “yang lain”.

Menurut Arivia (2003), teori terdahulunya adalah teori Jean Paul Sartre yang menyatakan bahwa ada tiga jenis eksistensi atau keberadaan, yaitu *etre ens soi* (ada pada dirinya), *etre pour soi* (ada bagi dirinya) dan *etre pour les autres* (ada untuk orang lain). Konflik menurut teori ini adalah inti dari hubungan antar subjek, sehingga hubungan antara individu juga berdasarkan pada konflik.

Feminisme eksistensialis melihat bahwa untuk menjadi eksis, perempuan harus hidup dengan melakukan pilihan-pilihan sulit, dan menjalaninya dengan tanggung jawab, baik atas diri sendiri maupun atas orang lain. Pada intinya berada

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

(eksistensial) mengacu pada individu bebas yang teraktualisasikan melalui komitmen diri pada pilihan radikal atas kemungkinan-kemungkinan. Menjadi manusia, berarti mendefinisikan diri melalui pilihan-pilihan itu.

Perempuan seharusnya memiliki kesadaran untuk menentukan pilihan bebasnya, perempuan dapat bekerja sesuai keinginannya, menjadi seorang intelektual, dan menolak dirinya untuk dijadikan liyan. Adapun beberapa kasus yang dapat menggambarkan perjuangan perempuan menurut feminisme eksistensial di ranah domestik; Dalam ruang rumah tangga dimana perempuan yang merasa dianiaya suaminya agar memiliki pilihan bebas untuk melawan perlakuan suaminya atau menggugat perceraian. Sedangkan pada perempuan di ruang kerja yang memiliki masalah dengan rekan laki-laknya dan merasa dilecehkan dapat melawan langsung dengan keberaniannya secara tatap muka. Pada akhirnya, perjuangan feminisme eksistensial menurut Beauvoir di ranah domestik adalah agar perempuan tidak menjadi perempuan narsis, dalam cinta, dan mistis.

### **C. Feminisme Postmodern**

Feminisme Postmodern yaitu feminisme yang menggali persoalan alienasi perempuan, seksual, psikologis, dan sastra bertumpu pada bahasan sebagai suatu sistem. Feminisme ini termasuk feminisme gelombang terakhir (ketiga) atau gelombang ketiga, dapat dikatakan sebagai feminisme baru, yang melihat isu-isu terkini dalam masyarakat, yang dikaitkan dengan ketertindasan perempuan.

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

Ide Posmo menurut anggapan mereka adalah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial.

Pemikiran dasar dari feminisme postmodern seperti filsafat postmodernisme, yaitu menolak konsep universalisme, absolutisme, dan esensialisme. Tokoh-tokoh feminisme dalam aliran postmodern ini antara lain Hélén Cixous, Lucy Irigaray, Yulia Kristiva, Sandra Hading, dan Andrea Nye, serta Seyla Benhabib. Tokoh-tokoh feminisme posmodernisme tersebut mendekonstruksi wacana universal dan menolak dualisme maskulin-feminim yang sebelumnya kerap dijadikan titik tolak untuk menganalisis persoalan gender dan ketimpangan dari kaum perempuan laki-laki. Feminisme dalam kelompok ini tidak bertolak dari dualisme semacam itu dan tidak pula bertolak dari tuntutan persamaan (kesetaraan), tetapi bertolak dari “perbedaan” atau “pluralitas”. (Tong, 1998).

Dalam feminisme posmodern perempuan juga dianggap sebagai “yang lain”. Seorang perempuan teralienisasi karena cara berpikirnya, cara keberadaannya, dan bahasa perempuan yang menghalangi terciptanya keterbukaan, pluralitas, diversifikasi dan perbedaan. Dengan memandang pada bahasa sebagai sebuah sistem, feminis posmodern mencoba untuk menguak teralienisasinya perempuan dalam seksualitas, psikologi dan sastra (Arivis, 2003).

Yang menarik dari pemikiran feminisme postmodern adalah tentang kebebasan dan identitas. Perspektif kebebasan menurut feminisme postmodern adalah adanya pengakuan

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

bahwa perempuan dan laki-laki berbeda dan sebenarnya perempuan tidak menginginkan hak untuk menjadi sama dengan laki-laki karena yang diinginkan sebenarnya adalah hak untuk bebas mengonstruksi diri sendiri seperti yang dimiliki laki-laki. Artinya tidak ada kelompok yang menentukan identitas bagi yang lain atau perempuan tidak didefinisikan oleh laki-laki melainkan oleh dirinya sendiri. Subjektivitas dan identitas adalah cair dan karena itu perempuan kemudian berhak mempertanyakan dan mengonstruksi identitas dirinya sebagai manusia yang bebas (Riant Nugroho, 2008).

Feminisme aliran ini memiliki fokus tinggi dalam menggaungkan pluralisme dan mendekonstruksi teks terkait relasi perempuan dan laki-laki di tengah masyarakat. Pandangan dasarnya masih sama, yaitu kondisi awal perempuan adalah termarginalkan, hanya saja mereka menitikberatkan perhatian bahwa marginalisasi itu dibentuk secara struktural melalui narasi besar budaya yang dibangun oleh bahasa laki-laki. Jadi perempuan termarginalkan bukan semata-mata karena inferioritas akibat kondisi tubuh mereka, tapi memang ada struktur teks yang menentukan cara bicara, cara berpikir yang sangat laki-laki. Mereka memandang pengaruh laki-laki dan patriarki sedemikian besarnya sehingga nampak berlebihan dalam merespon teks dan sedikit perhatiannya terhadap realitas secara praksis. Seolah-olah perempuan nihil kontribusinya dalam pembangunan kebudayaan, dan karenanya harus merekonstruksi bahasanya sendiri hingga identitas seksualnya .

#### **D. Black Feminism**

Aliran pemikiran feminis ini merujuk kepada teori perjuangan kulit hitam. Aliran ini berkembang dalam suatu tradisi aktivisme kalangan “kiri” yang mengadopsi feminisme sosialis. Bagi perempuan kulit hitam, yang merupakan minoritas di negara Barat seperti Inggris dan Amerika, teori arus utama tidak memberi ruang bahasan yang cukup tentang diskriminasi rasial. Sehubungan dengan itu, mereka mengembangkan feminisme kulit hitam untuk menolong perempuan yang menghadapi dua permasalahan krusial sekaligus yaitu rasisme dan seksisme.

Amerika Serikat yang dikenal dunia sebagai negara demokratis dianggap sering melakoni ironi, yaitu diskriminasi rasial, terutama terhadap minoritas kulit hitam masih terlalu kuat. Gemma Tang Naim melihat penindasan terhadap kulit hitam tidak semata-mata berkait dengan gender, tetapi juga ras dan kelas. Jadi, pada dasarnya gerakan feminisme ini muncul sebagai respon atas feminisme kulit putih kelas menengah yang tidak menyadari rasisme memiliki pengaruh besar baik terhadap kelompok dominan maupun minoritas.

#### **E. Feminisme Islam**

Feminisme Islam sendiri memang belum sepenuhnya dikatakan sebagai sebuah aliran, namun maksud dari feminisme Islam adalah feminisme menggunakan kacamata berfikir al-Qur'an dan Hadits.

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

Feminisme dalam konteks teokrasi kontemporer, memiliki makna bahwa hak kaum perempuan yang beriman untuk menuntut tanggung jawab secara penuh dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan menggugah klaim-klaim penguasaan keagamaan dalam birokrasi negara yang tidak dipilih secara demokratis. Islam secara tegas membedakan dimensi kemanusiaan yang eksklusif dari Nabi Muhammad agar tidak dicampuradukkan dengan firman Allah SWT, hal ini berpedoman pada anggapan yang menyatakan bahwa ulama hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan, hanya Allah yang Maha Benar (Mernissi dan Hassan, 2000).

Muslim feminis adalah orang Islam yang memiliki perhatian dan kepedulian dalam memahami dan menjelaskan kedudukan laki-laki atau perempuan untuk memberdayakan keduanya. Dengan kajian-kajian yang dilakukannya, mereka berusaha membongkar ketidakadilan gender yang selama ini telah mapan. Mereka berupaya mengungkapkan sumber ketidakadilan baik berupa pemahaman dan interpretasi yang kurang tepat terhadap teks-teks ajaran agama maupun budaya masyarakat yang sangat bias.

Konsep feminisme Islam yang diperjuangkan oleh Fatimah Mernissi jelas berbeda dengan feminisme yang berasal dari barat, karena di dalamnya memiliki intisari karakteristik Islami yang bersumber pada kitab suci al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam al hadis. (Widyastini, 2008).

Feminisme Islam memiliki kekhasan yang berbeda dengan aliran feminisme lain yaitu adanya dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam keagamaan (al-Qur'an dan hadits) dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada atau hidup dalam masyarakat



*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

Islam. Perubahan cara pandang dan penafsiran teks keagamaan adalah kata kunci yang paling penting yang juga merupakan tujuan feminisme Islam.

Namun, feminisme Islam tentu saja tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminis yang berasal dari Barat, khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Di sisi lain feminisme Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yang terabaikan dikalangan tradisional konservatif, yang menganggap perempuan sebagai subordinat laki-laki. Dengan demikian, feminisme Islam melangkah dengan menengahi kelompok tradisional konservatif di satu pihak dan pro feminisme modern di pihak lain.

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

## **BAB 4**

### **GENDER DAN PEMBANGUNAN**

#### **A. Makna Pembangunan**

Sudah disinggung sebelumnya bahwa gender menurut Fakih (2013) merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial ataupun kultural, baik melalui keagamaan maupun Negara. Hal ini berarti sebuah konsep gender merupakan sebuah label atau judgment terhadap jenis kelamin tertentu yang dikonstruksi secara sosial dan tergantung budaya yang ada di masyarakat tersebut.

Dalam penjelasan yang lain, gender merupakan jalan yang menjadikan seseorang maskulin atau feminin, yang merupakan gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita, serta merupakan seperangkat peran, yang menyampaikan kepada orang lain bahwa seseorang tersebut feminin atau maskulin.

Dengan demikian, gender merupakan seperangkat peran yang dikonstruksi secara sosial, dapat berubah dan dipertukarkan, serta berbeda antara satu kultur dengan kultur yang lainnya. Perbedaan itu pun terkadang akan berubah seiring berjalannya waktu. Namun demikian, perbedaan-perbedaan ini terkadang dapat dijadikan sebuah alasan klasik sebagai pemicu terjadinya sebuah permasalahan yang terkait dengan kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan, namun di sisi lain juga dapat digunakan sebagai dasar pembagian kerja sesuai

dengan konstruksi sosial yang dilekatkan kepada sebuah jenis kelamin tertentu. Dahulu wanita mungkin hanya dijadikan konco wingki dan dianggap tidak mampu untuk memenuhi nafkah keluarga. Namun, seiring perkembangan jaman dan semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, seorang istri dapat melakukan pekerjaan sampingan yang dapat membantu ekonomi keluarga dan tanpa meninggalkan kewajibannya mengurus rumah tangga. Hal ini merupakan pembuktian yang cukup nyata mengenai keterlibatan perempuan dalam pembangunan, karena ia mulai turut berpartisipasi meningkatkan ekonomi keluarga, sebagai subjek pembangunan.

Menurut Siagian (1983), pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan demikian ide pokok pembangunan menurut Siagian: pembangunan merupakan suatu proses; pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah kepada modernitas; modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan (Suryono, 2004).

Dalam konteks ini pembangunan dipandang sebagai suatu proses yang kompleks yang melibatkan upaya-upaya perbaikan individu secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya dan juga upaya perbaikan masyarakat itu sendiri, perempuan dan laki-laki merupakan subyek yang aktif dan bukan penerima pembangunan yang pasif. Dalam pengertian ini,

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

perbaikan adalah memberdayakan mereka yang dirugikan termasuk perempuan, dan merubah relasi-relasi yang tidak setara termasuk relasi-relasi antar gender. Tujuannya merubah hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan potensi-potensi dan kebutuhan-kebutuhan mereka.

Proses pembangunan sangat berkaitan erat dengan pemberdayaan manusia. Pemberdayaan manusia dapat dilihat sebagai proses dan hasil akhir kemajuan yang bersifat mandiri. Hasil pembangunan menunjukkan adanya kesenjangan perolehan manfaat yang diterima laki-laki dan perempuan. Kesenjangan tersebut dapat diperkecil dengan kebijakan pembangunan yang memasukkan dimensi gender kedalamnya. Dimensi gender dalam pembangunan dapat mengukur keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, serta manfaat yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan.

Berbicara mengenai kesetaraan gender, maka sesungguhnya berbicara tentang kesamaan di muka hukum serta kesetaraan peluang, termasuk peluang untuk mengemukakan pendapat. Kerap kali, hal kesetaraan gender adalah mengenai pemberian peluang yang lebih baik kepada perempuan dalam semua hal tersebut.

Hak-hak perempuan dilindungi oleh banyak instrumen dan hukum internasional. Paling terkenal di antaranya adalah Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW, 1979) sebuah Traktat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979 dan pada awalnya ditandatangani oleh 64 negara di bulan Juli tahun berikutnya. Sebuah protokol opsional disusun kemudian untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban negara-negara

terhadap traktat. Sejak itu ada beberapa deklarasi internasional dan perjanjian yang telah digunakan sebagai standar untuk mengukur kemajuan dalam urusan perempuan. Termasuk di antaranya Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (1995) serta Tujuan Pembangunan Milenium/ MDGs (2001) yang memuat pertimbangan-pertimbangan gender pada hampir setengah dari keseluruhan klausul. MDGs bersifat saling menguatkan, yaitu kemajuan pada satu tujuan mempengaruhi kemajuan dalam tujuan lain. Namun, tujuan ketiga berbicara secara khusus tentang kesetaraan gender.

Kesetaraan gender bertujuan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam menyikapi permasalahan mereka terkait pembangunan, mereformasi lembaga-lembaga untuk membangun hak-hak dan peluang yang setara, serta mendorong perkembangan ekonomi yang menguatkan kesetaraan partisipasi. Pendekatan semacam itu bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan yang terus ada terkait akses terhadap sumber daya alam dan kemampuan untuk mengemukakan pendapat.

Sebagaimana disinyalir World Bank bahwa kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dalam konteks itulah jika negara kita mau membangun pemerintahan yang maju setidaknya memperhatikan masalah secara khusus yang berkaitan dengan kesetaraan gender (World Bank, 2001).

Untuk menilai gender dan pembangunan, maka yang perlu dilakukan adalah menggunakan pendekatan dalam bukunya Mosse (2007), yaitu pendekatan Esther Boserup, serta tiga pendekatan yang diungkap oleh Moser, yaitu pendekatan

antikemiskinan, pendekatan efisiensi, dan pendekatan pemberdayaan.

### 1. Pendekatan Modernisasi

Pandangan modernisasi Esther Boserup melihat kembali proses pembangunan tahun 1950-1960an dengan pandangan yang peka gender. Boserup tidak hanya melihat peran perempuan dalam reproduksi saja, tetapi juga peran produktifnya yang vital dalam ekonomi pertanian. Boserup melihat peran pertanian dalam pendekatan yang berkembang pada masa itu, yaitu pendekatan modernisasi. Menurut pendekatan ini, perempuan diabaikan, atau dilihat sebagai bagian dari rumah tangga, atau dengan kata lain hanyalah objek kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan era modernisasi yang meletakkan perempuan sebagai sarasannya menunjukkan bahwa perempuan hanyalah penerima pasif pembangunan.

Jika dirunut dari keberadaan pendekatan tersebut, strategi modernisasi dapat dikatakan tidak berhasil menghapus kemiskinan. Demikian pula kaitannya dengan perempuan, yang tidak tersentuh langsung oleh program-program tersebut, justru akan dirugikan. Argumen yang dikemukakan adalah, jika kerja tradisional perempuan tidak diakui sebagai bagian dari perekonomian nasional, diperlukan upaya untuk memberi mereka pekerjaan yang bernilai, yang seharusnya diintegrasikan ke dalam pembangunan. Atau setidaknya diintegrasikan ke dalam perekonomian pasar, yang menghasilkan barang atau jasa yang akan menjamin pendapatan bagi mereka dan akan memberi kontribusi kepada proses pembangunan yang bisa diukur oleh GNP. Pendidikan, pelatihan ketrampilan, serta pelatihan teknis dapat dilakukan

untuk mewujudkan hal tersebut. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama seperti laki-laki, dalam kontribusinya di pembangunan.

## 2. Pendekatan Antikemiskinan

Sejak akhir tahun 1960an, tampak jelas bahwa kelompok termiskin dari kelompok miskin tetap miskin, dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Pendekatan antikemiskinan terhadap perempuan dalam pembangunan lebih mengambil kemiskinan sebagai pangkal tolaknya daripada subordinasi sebagai sumber ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki, dan dibangun untuk memperbaiki pendapatan kaum miskin.

Pendekatan antikemiskinan menitikberatkan perhatian guna menghasilkan pendapatan bagi perempuan melalui akses yang lebih baik terhadap sumber daya produktif, seperti tanah dan kredit. Sejak 1970an, banyak program-program yang dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan bagi perempuan miskin, yang kebanyakan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja yang telah dilakukan perempuan, misalnya produksi dan pemasaran makanan ringan. Akan tetapi, muncul kecaman bahwa proyek tersebut hanya sedikit sekali mempertimbangkan bahwa perempuan telah siap diberi beban kerja yang berlebihan; mereka tidak mengontrol anggaran belanja keluarga sehingga sulit untuk memiliki tabungan; bahwa kebebasan bagi kebanyakan perempuan sangat terbatas; serta bahwa kapasitas sektor informal untuk menghasilkan pekerjaan dan pertumbuhan juga terbatas.



### 3. Pendekatan Efisiensi

Secara historis, pendekatan efisiensi muncul dari kemunduran perekonomian dunia sejak pertengahan 1970an, yang mana fase kebijakan penyesuaian struktural dan penekanan global pada efisiensi dan peningkatan produktivitas. Catatan Moser tentang pendekatan efisiensi menjelaskan bahwa pendekatan ini memiliki implikasi bagi perempuan, tidak hanya sebagai penghasil keturunan, tetapi juga semakin meningkatkan posisi mereka sebagai manajer komunitas.

Pendekatan efisiensi bekerja pada 2 tingkat yang berbeda. Memastikan efisiensi dalam proyek pembangunan menuntut keterlibatan perempuan karena mereka sering lebih efisien dan setia dibandingkan laki-laki. Kendati pendekatan efisiensi didasarkan pada gagasan mengenai elastisitas waktu perempuan (dan karenanya kerugian bagi perempuan dalam istilah waktu yang dibutuhkan dari mereka mungkin sangat berat), sebuah proyek pembangunan lebih mungkin berhasil jika perempuan dilibatkan sepenuhnya. Aspek kedua adalah kebijakan pembangunan pada tingkat makro yang dikejar oleh pemerintah, yang menuntut efisiensi dan produktivitas dalam program penyesuaian structural. Pada tingkat inilah efisiensi dilakukan dengan cara mengubah biaya dari perekonomian dibayar ke perekonomian tak berbayar, yang cenderung memanfaatkan buruh perempuan yang tak dibayar. Kadang-kadang, kedua tingkat ini bertemu. Sebenarnya, pertemuan tersebut memperoleh efisiensinya melalui keyakinan atas waktu perempuan yang tersedia secara bebas.

### 4. Pendekatan Pemberdayaan atau Gender and Development

Satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan, baik kerja produktif, reproduktif, privat, maupun publik, dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga, mulai dikenal sebagai “pemberdayaan”, atau lebih umum dikatakan sebagai Gender and Development terhadap perempuan dalam pembangunan.

Pemberdayaan lebih terkait dengan pendekatan dari bawah ke atas (bottom up) dan kebanyakan pemikiran ini muncul dari tulisan feminis dan gerakan perempuan yang muncul di Selatan. Pendekatan ini melacak akar-akar subordinasi dalam ras, kelas, sejarah kolonial, dan posisi Negara-negara Selatan dalam tata ekonomi internasional. Pendekatan ini memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal, dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan undang-undang yang berkenaan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan, ketimbang pemberdayaan itu sendiri untuk berusaha mengubah dan mentransformasikan struktur yang sangat bertentangan dengan mereka, seperti UU perburuhan, kontrol laki-laki atas tubuh dan hak reproduktif perempuan, UU sipil, dan hak atas kekayaan.

Secara umum berdasarkan pendekatan-pendekatan di atas, bisa ditarik beberapa parameter yang memfasilitasi suatu lingkungan yang mendukung bagi pembangunan gerakan yang adil gender. Misalnya, melakukan afirmasi akan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender dan kekuasaan patriarki sebagai bagian integral keadilan dan menyebutkannya secara

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

eksplisit sebagai prioritas; terlibat secara positif dalam refleksi internal dan aksi untuk hak-hak perempuan dan keadilan gender, memberikan dukungan terhadap kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam semua aspek gerakan sosial, mengatasi kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Memastikan distribusi peran/kedudukan yang setara dalam struktur organisasi, memastikan kesetaraan partisipasi, mempertimbangkan hal pengurusan anggota keluarga, mempertimbangkan bahwa perempuan bisa menjadi target pembalasan oleh anggota masyarakat yang merasa terancam oleh adanya keadilan gender yang menimbulkan perubahan-perubahan dalam peran tradisional.

## **B. Kegagalan Pembangunan Ortodoks**

Pembangunan ortodoks merupakan suatu formula dan kebijakan yang disusun dan didesakkan oleh korporasi internasional dari negara-negara industri untuk dilaksanakan oleh negara-negara miskin melalui apa yang disebut "menghapuskan kemiskinan" melalui "pembangunan ekonomi" dengan strategi "pertumbuhan' ekonomi".

Dalam perspektif sosiologis, prioritas pembangunan adalah usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi secara menyeluruh dan sebagai upaya pemberantasan angka kemiskinan. Pembangunan dilaksanakan atas dasar aspirasi masyarakat yang menghendaki peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik, dengan visi dan misi kepemimpinan yang kondusif yang memiliki visi prospektif jauh ke depan untuk memajukan masyarakat. Perpaduan aspirasi masyarakat dan visi para pemimpin dituangkan dalam rencana pembangunan nasional.

*Ruh* tata ekonomi usaha bersama uang berasas kekeluargaan adalah tata ekonomi yang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi. Tata ekonomi yang seharusnya dibangun adalah bukan tata ekonomi yang monopoli atau monopsoni atau oligopoli. Tata ekonomi yang dituntut konstitusi adalah tata ekonomi yang memberi peluang kepada seluruh rakyat atau warga negara untuk memiliki aset dalam ekonomi nasional. Tata ekonomi nasional adalah tata ekonomi yang membedakan secara tegas barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh pemerintah dan barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh sektor private atau sektor non pemerintah. Mengenai bentuk kelembagaan ekonomi, walaupun dalam penjelasan diinterpretasikan sebagai bentuk koperasi, tetapi tentu harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan.

Beberapa teori yang disinyalir sebagai ortodoks adalah teori pertumbuhan Rostow. Teori Rostow didasari pada pengalaman empiris pembangunan yang telah dialami oleh negara-negara maju terutama di Eropa. Dengan mengamati proses pembangunan di negara-negara Eropa dari mulai abad pertengahan hingga abad modern, maka kemudian Rostow memformulasikan pola pembangunan yang ada menjadi tahap-tahap evolusi dari suatu pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Yang terbagi dalam lima tahap yaitu: tahap perekonomian tradisional; tahap prakondisi tinggal landas; tahap tinggal landas; tahap menuju kedewasaan; tahap konsumsi massa tinggi (Mudrajat Kuncoro, 2001).

Teori pembangunan Rostow merupakan pola penggambaran sejarah pembangunan di negara-negara Eropa

yang memiliki struktur sosial dan budaya yang mapan (Mudrajad Kuncoro, 2001). Mereka telah menjadi negara imperialis, kolonialis dan penjajah, sedangkan sebaliknya negara Asia dan Eropa adalah negara yang menderita akibat imperialisme, kolonialisme, dan penjajahan itu. Sehingga tahap konsumsi tinggi negara Eropa adalah dari hasil kekayaan negara jajahan. Sehingga negara Eropa dalam tahap ini mampu menyantuni pengangguran dan rakyat miskin seperti di Belanda dan Jerman. Hal ini tidak dapat dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia.

Kemudian teori pembangunan Arthur Lewis. Teori pembangunan Arthur Lewis mendasari pembahasan proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, dengan mengikut sertakan faktor urbanisasi. Arthur Lewis mengasumsikan perekonomian negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu: perekonomian tradisional dan perekonomian industri. Teori pembangunan dua sektor ini mengakibatkan pertumbuhan industri yang cukup cepat dan mengakibatkan pekerja di sektor formal yaitu pada industri dan sektor informal yaitu tradisional. Kecepatan pertumbuhan ekonomi akan mengganggu perekonomian tradisional yang padat karya, sedangkan perekonomian industri menjadi padat modal. Industrialisasi ini menggaggu keseimbangan ekologi yang mengurangi penghasilan sektor pedesaan dan sektor Informal.

Teori Arthur Lewis berkembang di Inggris, namun setelah kehabisan lahan untuk perekonomian tradisional Inggris mampu melakukan ekspansi pasar ke luar negeri terutama di Amerika, Asia dan Afrika, yang seakan-akan tidak ada masalah akibat industrialisasi.

Yang terakhir adalah Teori Ketergantungan dengan asumsi dasar teori ini adalah pembagian perkonomian dunia dalam dua golongan yaitu:

1. Perkonomian negara-negara maju (Negara Metropolis/ *Core Central*).
2. Perekonomian negara-negara sedang berkembang (Negara Satelit/ *Pheriphery*).

Interaksi negara maju dan negara berkembang lebih bersifat eksploitasi negara maju terhadap negara berkembang atau disebut pembangunan negara berkembang yang semu atau ragu-ragu atau setengah hati. Hutang luar negeri bukan membantu perekonomian negara berkembang justru mencekik kehidupan rakyat negara berkembang menjadi semakin miskin dan tergantung. Di sisi lain konsumsi produk negara maju oleh negara berkembang semakin tinggi.

Dalam kasus Indonesia, kegagalan teori pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru dalah merupakan akibat penerapan pola pembangunan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia dimana: 1. Jumlah masyarakat Indonesia cukup besar. 2. Sejarah panjang penjajahan di Indonesia. 3. Struktur sosial masyarakat Indonesia. 4. Kepemilikan sumber daya alam yang melimpah di daerah katulistiwa. 5. Sumber daya manusia yang kurang dinamis.

Model pembangunan yang bersifat kapitalistik nyata-nyata gagal di Indonesia dengan kebangkrutan dan lengsernya Orde Baru. Sedang teori pembangunan sosialis dan komunisme gagal diterapkan di Indonesia karena struktur sosial masyarakat Indonesia berbeda dengan struktur masyarakat di Eropa dan negara Amerika Latin, sehingga struktur kelas tidak menonjol karena nilai-nilai asli bangsa Indonesia, meskipun nilai-nilai itu

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

sudah mulai terkikis. Maka penerapan sistem ekonomi yang berdasarkan sosialisme Indonesia lebih tepat dijalankan. Pengangguran semakin meningkat dari tahun ke tahun dan pertumbuhan di Indonesia adalah tetap, artinya bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada tidak mendorong peningkatan lapangan kerja, justru mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran.

Pengembangan sumber daya manusia dibutuhkan dengan cara meningkatkan tingkat pendidikan dengan pembiayaan pendidikan yang lebih besar dan lebih diutamakan pada pendidikan yang meningkatkan nilai lebih pada bidang sains, teknologi dan industri yang berbasis lingkungan kekayaan bangsa Indonesia. Pemberian bea siswa dan biaya pendidikan yang murah serta terjangkau, sehingga memiliki tanggung jawab yang tinggi pada pembangunan negara.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak disertai pemerataan karena adanya akumulasi modal yang mengakibatkan inefisiensi adalah sangat mempercepat kegagalan pembangunan, maka perlu didukung kebijakan fiskal yaitu tentang pajak dan distribusi pendapatan yang mengurangi kesenjangan, meningkatkan produktifitas dan memacu semangat untuk investasi. Penyaluran kredit yang tepat dan mengendalikan tingkat konsumsi dengan mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan ekspor.

Hubungannya dengan gender adalah bahwa ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan.

Penurunan kemiskinan dan kesetaraan gender dari hasil pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong peran perempuan dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi diyakini oleh sebagian besar ekonom sebagai indikator yang paling tepat dalam menggambarkan proses kemajuan pembangunan suatu negara. Hal ini terkait dengan kemampuannya dalam menggambarkan tercapainya suatu proses peningkatan kapasitas produksi nasional, peningkatan jumlah konsumsi dan yang terpenting adalah peningkatan pendapatan (Arsyad Lincoln, 2010).

Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith (dalam Arsyad, 2010) dapat dibedakan dalam dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu (1) pertumbuhan output total; dan (2) pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting terkait penurunan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi berarti terjadi peningkatan pendapat. Pertumbuhan ekonomi terkait pula dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk berdampak pada struktur demografi sehingga memengaruhi komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Pertumbuhan penduduk akibat pertumbuhan ekonomi harus mampu membawa keteraan gender.

Pada perkembangannya, saat ini perempuan Indonesia sudah memberikan sumbangan besar bagi kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat terlihat dari banyaknya



*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

perempuan yang berkarya dan bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Bahkan banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga karena suami tidak bekerja atau menjadi orang tua tunggal. Di samping itu banyak prestasi yang diperoleh para perempuan Indonesia pada level nasional maupun internasional. Potensi yang dimiliki oleh perempuan Indonesia, tidak kalah dengan laki-laki. Semakin banyak kesempatan yang diberikan pada perempuan untuk peran publik, maka akan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Mengingat jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan penduduk laki-laki.

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

## **BAB 5**

### **KESADARAN BARU DI KALANGAN PEREMPUAN PERIODE 1970-AN**

#### **A. Di Negara Amerika Serikat, dan Aktivisme hingga Teori**

Emansipasi adalah proses pelepasan diri para perempuan dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah, serta pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan-kemungkinan untuk berkembang dan maju. Di Amerika, gerakan emansipasi perempuan sudah mulai terdengar dengungnya jauh sebelum Perang Dunia I, dan puncak gerakan emansipasi tersebut adalah revolusi yang terjadi pada tahun 1960an.

Dalam sebuah bacaan dijelaskan gerakan emansipasi perempuan di Amerika pada saat itu sebahagian besar terjadi di daerah perkotaan, karena di daerah inilah banyak timbul masalah-masalah yang disebabkan oleh kemajuan jaman, yang menyebabkan banyak kaum perempuan memutuskan untuk bekerja di luar rumah. Sehubungan dengan keputusan tersebut, masalah-masalahpun timbul, diantaranya ketidak-adilan dan diskriminasi gender yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan, terlebih kepada tenaga kerja perempuan yang bekerja di pabrik dan perusahaan. Sejak saat itulah muncul gerakan perempuan yang menuntut emansipasi.

Dalam sejarah panjangnya, Humm (2002), membagi feminisme Amerika dalam dua gelombang. Gelombang pertama mengikuti Seneca Falls Convention pada 1848-1920. Pemikir dan pembuat naskah kunci adalah Margaret Fuller, Elizabeth

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

Cady Stanton, Susan B. Anthony, dan Charlotte Perkins Gilman. Gelombang feminisme kedua berawal pada 1960-an. Tokoh-tokohnya adalah Betty Friedan, Schulamith Firestone, Kate Millet, dan Gloria Steinem (Madsen, 2000). Sementara, pada 1970 dalam perkembangannya feminisme Amerika diwarnai dengan pemikiran tentang ras yang disampaikan oleh Angela Davis dan Bell Hooks; dan pemikiran tentang lesbian oleh Adrienne Rich dan Audre Lorde. Selanjutnya, pada 1980-an teori feminis Perancis memengaruhi feminis di Amerika, yaitu feminis kultural atau feminis postmodernisme yang diwakili oleh Judith Butler.

Di Amerika Serikat sendiri, gerakan ini mendapat tantangan keras terutama dari kalangan konservatif ekstrim yang menuduh bahwa gerakan feminisme telah menggoncangkan kestabilan sosial Amerika Serikat. Gerakan itu dituduh sebagai gerakan anti children dan anti future. Alasan mereka dibuktikan dengan munculnya pernyataan-pernyataan gerakan feminisme pada tahun 1960an dan 1970an yang bernada bombardir, seperti "ibu rumah tangga adalah perbudakan perempuan", "heteroseksual adalah perkosaan", bahkan pernyataan yang dianggap sebagian kalangan paling radikal adalah sikap gerakan ini yang anti pernikahan (anti marriage), yang mungkin bagi kalangan feminis merupakan awal perbudakan dan munculnya domestikasi perempuan.

Tahun 1960an dan 1970an dianggap sebagai munculnya gerakan feminisme gelombang kedua. Di Amerika, kaum perempuan mulai mendirikan berbagai organisasi dan melakukan protes. Gerakan mereka telah membangkitkan gelombang kritik budaya tandingan pada universitas-universitas di seluruh bangsa (dunia). Kaum perempuan Kristen di Amerika Serikat, misalnya, memulai

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

kembali perjuangan mereka untuk bisa ditahbiskan di gereja. Begitu juga pergerakan kaum perempuan di Indonesia berusaha memperoleh kedudukan sebagai mitra sejajar bagi kaum laki-laki dalam pembangunan bangsa. Sejak waktu itu kaum perempuan lama kelamaan menjadi semakin sadar bahwa jenis pekerjaan, tujuan dan dimensi kerohanian dan moral kehidupan tidak sekedar dipolakan menurut pola kaum laki-laki. Kebanyakan perempuan, baik secara biologis maupun kultural, juga memusatkan kehidupan mereka pada kelahiran anak dan mengembangkan hubungan. Gejala seperti ini telah menjadi perhatian sentral bagi gerakan pembaharuan kebatinan di Indonesia (Koentjaraningrat, 1985).

Pada awal sejarahnya, kaum perempuan Amerika tidak berhak membuat keputusan di dalam rumah tangganya. Semua keputusan berada ditangan kaum laki-laki, baik itu mengenai keluarga, hak milik, maupun anak-anak. Kala itu perempuan bahkan tidak berhak dalam memutuskan nasibnya. Seiring dengan berjalannya waktu, keadaanpun berubah. Perempuan yang bersekolah dan bekerja mulai tampak, walaupun kehadiran mereka belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Masyarakat masih membuat perbedaan-perbedaan terhadap wanita.

Usaha-usaha untuk memperbaiki kedudukan perempuan di dalam keluarga maupun di masyarakat mulai dirintis sejak tahun 1800an. Perguruan tinggi mulai membuka kesempatan kepada perempuan. Perguruan tinggi yang pertama membuka kesempatan belajar adalah Oberlin College pada tahun 1833. disamping itu organisasi-organisasi perempuanpun mulai bermunculan dan mulai memperdengarkan ‘suaranya’ dalam hal persamaan hak. Gerakan abolisi pada tahun 1830an adalah pendorong kuat munculnya gerakan persamaan hak.

Gerakan kaum perempuan mulai menuntut persamaan hak, karena mereka merasa diperlakukan tidak adil, terutama dalam kesempatan kerja dan upah. Dibawah pimpinan pejuang-pejuang hak perempuan yang berpredikat pendeta, yaitu Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Coffin Mott, konferensi nasional pertama mengenai hak-hak perempuan diadakan di Seneca Falls, New York pada bulan Juni 1848. pada konferensi ini dibahas mengenai kehidupan sosial, sipil, dan agama, dan dalam konferensi tersebut terbentuk sebuah deklarasi yang disebut dengan Declaration of Sentiment. Deklarasi ini dibuat berlandaskan Declaration of Independence yang menegaskan bahwa laki-laki dan wanita diciptakan sama. Deklarasi tersebut berisikan 12 resolusi, diantaranya hak memilih, persamaan pendidikan, persamaan hak kesempatan kerja, hak milik, dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Diantara ke 12 resolusi tersebut hak memilih adalah hal yang paling banyak diperdebatkan, sebelum sidang memutuskan setuju pada resolusi tersebut.

Elozabeth Cady memperjuangkan hak suara kaum perempuan Amerika Serikat. Teks Declaration of Indepence menjadi pijakan Elizabeth untuk menulis Declaration of Sentiments and Resolution yang menjadi hasil konvensi dalam pertemuan bersejarah, yaitu Konvensi Hak-Hak Perempuan di Seneca Falls pada 19 Juli 1848. Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776 menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama. Berdasarkan deklarasi tersebut, konvensi menuntut prinsip-prinsip liberal diterapkan, baik kepada perempuan maupun laki-laki. Dia menegaskan bahwa kata “all the people” dalam konstitusi negara Amerika berarti kaum perempuan sebagai manusia termasuk di dalamnya.

Pemikiran Elizabeth tentang otonomi perempuan sebagai individu juga berdasarkan pada pemikiran individualisme liberal, tetapi ia tetap melihat bahwa perempuan merupakan suatu kolektivitas sosial yang harus bersatu dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Tuntutan perubahan hukum, secara *de facto* mengatur kepemilikan dalam perkawinan mengasumsikan bahwa perubahan di tingkat hukum akan mengubah relasi istri dan suami (Hadiz, 1998).

Selain Elizabeth Cady yang berafiliasi ke feminis liberal, Kate Millet dan Firestone adalah dua tokoh feminis radikal yang telah menyumbang pada pengembangan teori feminisme. Kedua tokoh ini berasal dari Amerika, dan dari sana, feminisme, baik sebagai gerakan politik maupun pemikiran tumbuh dengan kuat pada era 1970-an.

Kate Millet dalam bukunya *Sexual Politics* (1970) mengatakan bahwa patriarkat merupakan sebab penindasan perempuan. Patriarkat memperlakukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kekuasaan dan kekuatan secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk membatasi ruang gerak perempuan, baik di dalam maupun di luar rumah. Secara formal, perempuan telah mendapatkan semua haknya sebagai warga negara, tetapi dalam kehidupan nyata, perempuan masih dikuasai oleh sistem kelas jenis kelamin. Di sini, Kate Millet memakai istilah *sex* dan *gender*. Seks ditentukan secara biologis, dan *gender* mengacu pada identitas seksual secara kultural. Kate Millet berpendapat bahwa sifat-sifat perempuan yang dibentuk secara kultural bukan sebagai sesuatu yang alami. Peranan seks tersebut diterima masyarakat dan bahkan disosialisasikan dalam kehidupan. Pelaksanaan peranan yang tidak sama antara

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

dominasi dan subordinasi oleh Kate Millet disebut politik seksual (Selden, 1985).

Kate Millet bersama dengan Mary Ellman melihat ketidakadilan ini dan berusaha untuk membangkitkan kesadaran politis perempuan terhadap tekanan laki-laki. Seperti halnya bentuk-bentuk politik lain yang memperjuangkan kaum tertindas, yaitu orang kulit hitam dan kelas pekerja, feminisme memperjuangkan perempuan. Mereka mempunyai argumen yang sama, yaitu penindas secara sadar berkeinginan mempertahankan penindasan secara tak terbatas melalui ideologi (rasis, borjuis, atau patriarkat). Dalam perjuangannya, mereka melakukan perjuangan politis untuk mengangkat kesadaran di antara yang tertindas dan mendorong perubahan radikal dalam hubungan kekuasaan di antara penindas dan tertindas. Millet beranggapan bahwa “ideologi adalah universal penil club yang merupakan tempat bagi laki-laki dari semua kelas untuk menghantam perempuan” (Selden, 1985).

Seperti halnya Millet, Firestone dalam *The Dialectic of Sex* (1970) menganggap bahwa dominasi laki-laki merupakan bentuk penindasan kemasyarakatan dan perekonomian. Tujuan teoritis Firestone adalah menggantikan kelas dengan jenis kelamin (Selden, 1985). Dalam bukunya dia mereinterpretasikan teori materialism Marxis untuk menerangkan penindasan seksual. Berbeda dengan analisis Marxis, dia menganggap bahwa sumber dari kelemahan perempuan adalah struktur biologisnya, maka, basis dari tertindasnya perempuan bukanlah ekonomi, tetapi biologi. Perempuan menjadi budak dari fungsi biologisnya. Subordinasi perempuan berhubungan dengan wilayah reproduksi. Perbedaan fungsi reproduksi alamiah perempuan dan laki-laki melahirkan pembagian kerja



*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

berdasarkan jenis kelamin yang muncul bersamaan dengan tumbuhnya kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Lebih lanjut Firestone (dalam Hadiz, 1998) mengatakan bahwa reproduksi biologis diasosiasikan oleh masyarakat dengan wilayah domestik dan menjadi dasar inferioritas sosial dan ekonomi perempuan. Oleh karena itu, Firestone mengatakan bahwa penting bagi perempuan untuk menguasai alat-alat reproduksi.

Dalam perkembangan selanjutnya kelompok gerakan emansipasi perempuan lainnya yang terdiri dari para kaum muda, mengkhususkan kegiatannya pada program-program lokal, seperti pusat kesehatan, pusat informasi, dan lain-lain. Kelompok ini tidak terlibat aktif dalam dunia politik serta mereka juga lebih mementingkan gerakan yang bersifat regional. Walaupun pada awalnya *National Organization for Women* (NOW) kurang mendapat dukungan tetapi gerakan NOW pada tahun 1960an telah membuat suatu perkembangan baru pada dekade selanjutnya. Pada dekade 1970an dan 1980an terjadi perkembangan keanggotaan yang mengejutkan, terlebih ketika NOW dipimpin oleh Judi Golsmith, anggotanya mencapai satu juta.

Pada tahun 1970an ada sebuah perkembangan lain yang membuat gerakan perempuan semakin kuat yaitu berdirinya partai politik wanita yang bernama Caucus. Pada tahun 1973, Partai Politik Nasional ini mengadakan sidangnya dengan dihadiri oleh 1200 anggota yang mewakili 30.000 anggota 50 negara bagian. Partai ini banyak belajar dari perjuangan NOW. Tidak seperti gerakan NOW sebelumnya, dimana NOW mengakui isu lesbianisme sebagai konsekuensi dari gerakan feminis yang dipelopornya, partai ini mencoba meredakan isu lesbianisme serta lebih banyak berkecimpung pada bidang-bidang sosial.

Partai ini mempunyai dua tujuan utama, yaitu pemilihan dan perbaikan keadaan kaum minoritas dan perjuangan memasukkan masalah kemiskinan kedalam perundang-undangan.

## **B. Di Negara Inggris: Teori dan Aktivisme**

Emansipasi perempuan tidak hanya terjadi di Amerika, Di Inggris, meningkatnya meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja menuntut disediakannya sekolah yang dapat mempersiapkan perempuan sebagai tenaga kerja profesional. Meski lapangan kerja yang tersedia umumnya berada pada sektor domestik, namun hal ini mendorong meluasnya kebutuhan pendidikan untuk perempuan. Pada gilirannya, semakin banyak perempuan yang terlibat di dunia pendidikan yang memicu dicetuskannya ide bahwa perempuan berhak mendapatkan hak pilih (Sanders, 2006).

Di Inggris, Kelompok Kanan terbentuk kuat di kalangan perempuan pekerja. Mereka melaksanakan pemogokan untuk menuntut persamaan upah. Sementara itu kelompok kiri sangat dipengaruhi oleh paham Sosialis Marxisme (Thornham, 2006). Namun dalam The British Liberation Conference pada 1970, aliran kanan dan kiri di Inggris bersatu dan menyerukan satu feminisme. Secara kompak mereka menuntut persamaan upah, persamaan pendidikan dan kesempatan kerja, tempat penitipan anak 24 jam, alat kontrasepsi gratis, dan aborsi sesuai kebutuhan. Tuntutan-tuntutan ini menunjukkan bahwa feminisme gelombang kedua berfokus pada isu perempuan sebagai kelompok yang tertindas dan tubuh perempuan sebagai situs utama penindasan tersebut.

Menurut Thornham (2006), salah satu ciri utama feminisme gelombang kedua baik di Inggris maupun di Amerika adalah usaha mereka untuk merumuskan teori yang mampu memayungi semua perjuangan feminis. Dalam pandangan Thornham, buku *The Second Sex* (1956) dari Simone de Beauvoir menjadi salah satu acuan utama feminisme tahun 1970an. Simone de Beauvoir menentang determinisme biologis dalam fisiologi, determinisme dorongan bawah sadar dalam psikoanalisa Freud dan determinisme subordinasi ekonomi dalam teori Marx (Phoca dan Wright, 1999; Thornham, 2006).

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Taufiq. 2009 Perspektif Gender Kyai Pesantren, Memahami Teks Menurut Konteks Relasi Gender Dalam Keluarga, Kediri: STAIN Press, 2009.
- Arivia, Gadis. 2003. Filsafat Berperspektif Feminis, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan (KAJIAN KRITIS PANDANGAN FEMINISME RADIKAL), Ulumuna, Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006.
- Burchill. 2013. Scott dan Andrew Linklater. Teori-Teori Hubungan Internasional. Bandung: Nusa media.
- Dadang S. Anshori dan Engkos Kosasih. 1997. Membincangkan Feminisme Bandung: Pustaka Budaya.
- Gamble, Sarah. 2010. Pengantar Memahami Feminisme dan Postfeminisme. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hadiz, Liza. 1998. “Teori Feminisme Radikal” dalam Jurnal Perempuan. Edisi 7, Mei-Juli. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Handayani, 2006. Trisakti dan Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, UMM Press, Malang.

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

Jacqui True, “Feminism” dalam Theories of International Relation Third Edition. New York : Palgrave McMillan, 2001.

Jill Steans, 2006. Gender and International Relations: Issues, Debate, and Future Directions, Second Edition Cambridge: Polity Press.

Judith Lorber. 2001. Gender Inequality: Feminist Theories and Practice. California: Roxbury Publishing Company.

Julia Cleves Mosse. 2007. Gender dan Pembangunan. Pustaka Pelajar, Jakarta.

Laura Sjoberg, ed., 2010. Gender and International Security: Feminist Perspectives, New York: Routledge.

Lincoln Arsyad, 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta.

Linda L. Lindsey, 1990. Gender Roles: A Sociological Perspective. New Jersey: Prentice Hall..

Manshour Fakih 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Mansour Faqih, 1996. Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Dari Analisis Gender, dalam Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, et. al., Mansour Faqih. Surabaya: Risalah Gusti.

Peterson, V.S. dan Runyan, A. S. 1999. Global Gender Issue. Edisi Kedua. Boulder CO: Westview.

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

- R. Valentina dan Ellin Rozana, 2007. *Pergulatan Feminisme dan HAM, HAM untuk Perempuan, HAM untuk Keadilan Sosial*. Bandung: Institut Perempuan.
- Riant Nugroho, 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sa'idah, Najmah dan Husnul Khatimah, 2003. *Revisi Politik Perempuan*. Jakarta: Idea Pustaka Utama.
- Selden, Raman. 1985. *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory*. Sussex: The Harvester Press Limited.
- Siti Muslikhati, 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Sri Suhandjati, 2002. *Pemahaman Islam dan tantangan Keadilan Jender*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sunarto. 2000. *Analisis Wacana Ideologi Gender Media Anak-anak*. Jakarta: Mimbar dan Yayasan Adikarya IKAPI.
- Suryono, 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Universitas Negeri Malang. UM Press. Malang.
- Sylvester, C 2004, *Feminist International Relations: An Unfinished Journey*, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Tickner, J. A 1992, *Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security*, Columbia University Press, New York.
- Tong Putnam Tong. 2004. *Feminist Thought*. Yogyakarta: Jalasutra.

*Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.*

Umar, 2001. *Argumen Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadani.

Valentina Schiavo, "I am Swedish, I am a Woman: Exploring Swedish Women's Identity Construction," Report nr. 2016:104 (University of Gothenburg, 2016).

Yunahar Ilyas, 1997. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zaitun Subhan, 1999. *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKIS.



## **BIODATA PENULIS**



**YeyenSubandi, S.IP., M.A.,** Lahir di Karawang 18 Januari 1979. Pendidikan formal yangditempuh mulai dari tingkat Sekolah Dasar danMadrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren Daar-El Qolam Tangerang. Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan

Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2004, dan gelar Master of Arts dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Interasional Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016, dan gelar Doktor pada Program Doktorat Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2001.

Dari tahun 2006 sudah aktif dalam isu-isu kemanusiaan yang bergabung di Non-Governmental Organization (NGO) lokal, nasional, dan internasional seperti World Bank, AusAID, USAID,dan juga isu penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia bersama tempat Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu aktif juga dalam isu penanggulangan kemiskinan bersama Kemitraan dan Word Bank.

Pada tahun 2016-2017 menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, kemudiantahun 2018 menjadi asisten pengajar di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mulai tahun 2018 juga menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Respati Yogyakarta.